



KETUM KADIN REKOMENDASIKAN TIGA PRIORITAS UNTUK MEMPERKUAT PERDAGANGAN DAN JASA INTRA-BRICS

**RDPU RUU Kadin: Anindya Bakrie
Dorong Penguatan Kelembagaan
Dunia Usaha dan UMKM Naik Kelas**

**Rakor Empat Bidang, Fokus Perkuat
Rantai Pasok Menuju Pertumbuhan
Ekonomi 8%**

**Anindya Bakrie: Transisi Menuju
Ekonomi Hijau Butuh Kolaborasi Erat
Pemerintah dan Dunia Usaha**

**James Riady: Indonesia Tak
Kekurangan Destinasi, tapi
Kemampuan Mengubah Potensi
Menjadi Devisa**

INDONESIA IKUT MENENTUKAN ARAH KERJASAMA BRICS

Anindya Novyan Bakrie



BRICS mewakili hampir separuh penduduk dunia dan sekitar 40 persen perekonomian global. Kekuatan sebesar itu memberi negara-negara anggotanya peluang untuk ikut membentuk masa depan perdagangan, investasi, industri, dan teknologi. Namun, besarnya BRICS baru berarti apabila kerja sama tersebut memudahkan perusahaan menemukan mitra, membuka pasar, membangun usaha, dan menerima pembayaran. Manfaatnya harus dapat dirasakan sampai ke tingkat pekerja dan pelaku usaha kecil.

Itulah pesan yang saya bawa dalam BRICS Business Forum di New Delhi, India, pada 11 September 2026. Bagi Indonesia, keanggotaan BRICS merupakan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional dalam forum yang semakin berpengaruh. Indonesia memiliki perwakilan yang aktif dalam BRICS Business Council.

Melalui wadah itu, dunia usaha kita dapat membawa usulan konkret ke meja pembahasan, sekaligus membangun kemitraan langsung dengan perusahaan dari negara anggota lain.

Kehadiran Indonesia harus berpijak pada agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto: hilirisasi sumber daya alam, penguatan sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi. Kita ingin menjual produk dengan nilai tambah lebih tinggi, menguasai teknologi yang digunakan untuk memproduksinya, serta menciptakan pekerjaan yang lebih baik. BRICS dapat membantu mempercepat tujuan itu jika kerja samanya membuka akses terhadap investasi, pengetahuan, pasar, dan rantai pasok.

Di sinilah perdagangan jasa menjadi penting. Sebuah pabrik tidak bekerja hanya dengan mesin dan bahan baku. Pabrik membutuhkan insinyur, perangkat lunak, pembiayaan, asuransi, transportasi, pergudangan, sertifikasi, dan tenaga kerja terampil. Semakin besar kemampuan menyediakan jasa-jasa tersebut, semakin besar pula nilai tambah yang dapat dinikmati negara tempat industri itu tumbuh. Karena itu, kerja sama jasa perlu berjalan beriringan dengan hilirisasi.

Indonesia memiliki peluang besar dalam hubungan tersebut. Hilirisasi mineral, misalnya, memerlukan kemampuan rancang bangun, penelitian material, pengelolaan energi, dan jasa logistik. Industri pangan memerlukan teknologi pengolahan, pengujian mutu, kemasan, serta jaringan distribusi. Bila seluruh layanan bernilai tinggi itu terus didatangkan dari luar, sebagian besar manfaat hilirisasi akan mengalir ke tempat lain. Kemitraan BRICS semestinya membantu perusahaan dan tenaga ahli Indonesia menguasainya secara bertahap.

Peluang yang sama terbuka di sektor kesehatan dan pendidikan. Kerja sama antarlembaga riset, rumah sakit, perguruan tinggi, dan perusahaan teknologi dapat meningkatkan kemampuan nasional sambil memperluas akses masyarakat terhadap layanan yang lebih baik. Pertukaran keahlian harus menghasilkan kemampuan yang menetap di Indonesia: tenaga profesional yang terlatih, institusi yang lebih kuat, dan perusahaan lokal yang mampu bersaing.

Agar peluang itu terwujud, saya mengusulkan tiga prioritas. Pertama, BRICS harus mempermudah kegiatan usaha lintas batas. Banyak perusahaan, terutama yang belum berpengalaman mengekspor, kesulitan memahami persyaratan pasar tujuan, mencari mitra yang dapat dipercaya, memperoleh izin, atau mengirim tenaga ahli untuk mengerjakan proyek. BRICS Business Council perlu memetakan hambatan tersebut secara terperinci, lalu membawa usulan penyelesaian yang dapat ditindaklanjuti pemerintah.

Salah satu langkahnya adalah memperluas pengakuan bersama atas kualifikasi profesi tertentu, dengan tetap menghormati aturan dan standar di setiap negara. Kemudahan perjalanan bisnis juga perlu dibahas. Saya mengusulkan BRICS Business Travel Card agar pengusaha dan tenaga profesional yang memenuhi persyaratan dapat lebih mudah melakukan kunjungan usaha. Kartu itu bukan tujuan akhir; tujuannya adalah mempercepat pertemuan, penyelesaian proyek, dan pembentukan kemitraan.

Kedua, BRICS perlu membuat pembayaran lintas negara lebih cepat, murah, dan aman. Perusahaan kecil dapat menemukan pembeli di luar negeri melalui platform digital, tetapi transaksi belum selesai sampai mereka bisa menerima uangnya dengan biaya yang masuk akal. India, Brasil, dan Tiongkok telah mengembangkan kemampuan pembayaran digital yang besar. Tantangannya ialah menghubungkan sistem yang ada melalui kerja sama teknis dan aturan yang memberi kepastian bagi pengguna.

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi yang sesuai juga layak diperluas. Pilihan itu dapat membantu pelaku usaha mengelola biaya dan risiko transaksi, selama tetap layak secara komersial serta memenuhi ketentuan keuangan masing-masing negara. Perlindungan data, pencegahan penyalahgunaan sistem, dan stabilitas keuangan harus menjadi bagian dari rancangannya sejak awal. Kedaulatan keuangan tidak harus berarti isolasi keuangan.

Ketiga, BRICS harus berinvestasi pada manusia dan infrastruktur pendukung perdagangan jasa. Kita memerlukan lebih banyak pekerja yang mampu menggunakan teknologi, mengelola produksi modern, dan memberikan layanan lintas negara. Pelatihan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah saja. Perusahaan perlu bekerja sama dengan sekolah vokasi dan perguruan tinggi, memberi kesempatan belajar di tempat kerja, serta membantu pekerja menyesuaikan keterampilannya ketika teknologi berubah.

Kecerdasan buatan membuka peluang baru, termasuk bagi UMKM, tetapi manfaatnya tidak akan muncul dengan sendirinya. Pelaku usaha kecil perlu tahu cara menggunakannya untuk membaca pasar, memperbaiki layanan pelanggan, mengelola persediaan, atau meningkatkan mutu produk. Saya mengusulkan agar setiap perwakilan negara dalam BRICS Business Council menetapkan target pelatihan yang terukur dan melaporkan jumlah orang yang memperoleh keterampilan baru setiap tahun.

Investasi pada keterampilan harus didukung jaringan digital, pusat pelatihan, konektivitas transportasi, dan layanan keuangan yang menjangkau usaha kecil. New Development Bank dapat mengambil peran dalam pembiayaan infrastruktur semacam itu. Dengan demikian, pembiayaan pembangunan tidak berhenti pada proyek besar, tetapi juga membantu lebih banyak perusahaan dan pekerja masuk ke kegiatan ekonomi yang bernilai tambah.

Bagi Indonesia, keberhasilan kerja sama BRICS tidak cukup diukur dari jumlah nota kesepahaman atau kunjungan bisnis. Kita perlu menanyakan hasilnya: berapa banyak investasi yang menciptakan pekerjaan terampil? Berapa pemasok lokal yang masuk ke rantai pasok? Berapa perusahaan Indonesia yang berhasil menjual jasa ke negara anggota lain? Berapa pekerja yang mendapat pelatihan dan penghasilan lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus mengarahkan pekerjaan BRICS Business Council Indonesia.

Kita juga perlu memastikan hubungan antar-anggota memberi kesempatan yang seimbang. Sebagai anggota baru, Indonesia membawa pasar yang besar, sumber daya, tenaga kerja, dan kemampuan industri yang terus berkembang. Kemitraan yang baik harus memberi ruang bagi perusahaan Indonesia untuk menjadi produsen, penyedia jasa, dan mitra teknologi. Indonesia harus ikut merancang agenda kerja sama agar manfaatnya memperkuat kemampuan ekonomi nasional.

Bayangkan seorang pelaku usaha kecil di Surabaya dapat menemukan pelanggan di São Paulo, Durban, atau Alexandria; memahami standar yang berlaku; mengirimkan produk atau jasanya; lalu menerima pembayaran dengan aman. Itulah gambaran sederhana tentang integrasi BRICS yang bermakna. Jika proses tersebut hanya mudah bagi perusahaan besar, pekerjaan kita belum selesai.

Semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 mengajarkan pentingnya membangun hubungan yang memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang. Dalam semangat itu, Indonesia siap menjadi penghubung, pengusul gagasan, dan pelaksana kerja sama ekonomi yang konkret. Indonesia ikut menentukan arah kerja sama BRICS ketika suara kita menghasilkan pasar yang lebih terbuka, kemampuan industri yang lebih kuat, dan kemajuan yang dapat dinikmati oleh lebih banyak rakyat.***

DAFTAR ISI

Membawa Visi Presiden Prabowo, Pidato Anin Disimak Putin, Modi, dan Sejumlah Pemimpin Dunia

7

RDPU RUU Kadin: Anindya Bakrie Dorong Penguatan Kelembagaan Dunia Usaha dan UMKM Naik Kelas

10

Anindya Bakrie: Transisi Menuju Ekonomi Hijau Butuh Kolaborasi Erat Pemerintah dan Dunia Usaha

13

"SMK Go Global Jatim" Tak Sekadar Kirim Pekerja, Tapi Siapkan SDM Profesional untuk Pasar Dunia

18

Kadin NTT Dukung Pembangunan Dapur MBG 3T, 60 Titik di Timor Tengah Selatan

21

Rakornas Gabungan Kadin, Fokus Pembenahan Regulasi Dunia Usaha hingga Penguatan Kelembagaan

22

Kadin Resmikan Logo Pemenang Sayembara Logo HUT Ke-58 Kadin Indonesia

25

Kadin Gelar Rakor Empat Bidang, Fokus Perkuat Rantai Pasok Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%

27

James Riady: Indonesia Tak Kekurangan Destinasi, tapi Kemampuan Mengubah Potensi Menjadi Devisa

29

Kadin dan Pegadaian Kolaborasi Dorong Emas Jadi Instrumen Tabungan dan Investasi

33

Temui Menteri Pertanian RI, Kadin Sampaikan Empat Program Utama Satgas Protein untuk Mendukung Program MBG

35

Kadin Dorong Kedaulatan AI Indonesia Melalui Penguatan Data, Infrastruktur dan Ekosistem Logistik

37

Wajib Halal Oktober 2026, Kadin Dorong UMKM Manfaatkan Peluang Perluas Akses Pasar Global

39

DAFTAR ISI

Kadin Indonesia Luncurkan Nusantara Rising dan Soft Power White Paper, Ajak Sinergi Lintas Sektor Menuju Indonesia Emas 2045	42
Kadin Buka Peluang Investasi Swedia di Indonesia, Fokus IEU-CEPA hingga OECD	44
KBRI Bern Dukung Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Komoditas Global antara Kadin Indonesia dan Suissenegoce Swiss	47
Kadin Indonesia Terima Estafet Tuan Rumah BIMP-EAGA Trade, Investment and Halal Industry Conference 2027	49
Kadin Indonesia Dorong Integrasi Ekonomi Borneo melalui Konektivitas, Investasi, dan Keberlanjutan	51
Kadin Manggarai Timur Dilantik, Perkuat Peran Dunia Usaha dalam Pemulihan Pascagempa	55
Kadin Sumut Buka Peluang Kerja Sama Lima Sektor dengan Victoria	56
Gandeng Platform Alibaba, Kadin Jatim Buka Akses UMKM Jatim Tembus Pasar Global	57
Kadin Sumut Sebut Bus Rapid Transit Mebidang Dorong Produktivitas Industri dan Pertumbuhan Ekonomi	59
Kadin Papua Tengah Galang Bantuan untuk Korban Bencana NTT 2026	61
Kadin Manggarai Timur Salurkan 107 Paket Sembako untuk Korban Gempa di Kisol	63
Kadin NTT Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke 7 Wilayah Terdampak Gempa Flores	64
Kadin Dorong Penguatan Sinergi dengan di MUNAS IV APPEKNAS untuk Percepat Transformasi Industri Konstruksi Nasional	66

HEADLINE

Membawa Visi Presiden Prabowo, Pidato Anin Disimak Putin, Modi, dan Sejumlah Pemimpin Dunia



New Delhi, India – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie membawa visi besar Presiden Prabowo Subianto mengenai hilirisasi, penguatan sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi ke panggung BRICS Business Forum 2026 di New Delhi, India. Berbicara di hadapan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta sejumlah pemimpin dunia lainnya, Anindya yang akrab disapa Anin menegaskan, Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pasar baru, tetapi ikut membentuk arah kerja sama ekonomi BRICS.

Dalam pidatonya pada Jumat (11/09/2026), Anin menyampaikan rasa bangga karena Indonesia telah menjadi bagian dari keluarga BRICS di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Indonesia, kata Anin, kini juga memiliki chapter yang aktif dalam BRICS Business Council sehingga dapat ikut mendorong agenda perdagangan, investasi, industri, teknologi, dan jasa di antara negara-negara anggota.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyampaikan paparan mengenai hilirisasi, penguatan sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi dalam membawa visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke panggung BRICS Business Forum 2026 di New Delhi, India, Jumat (11/09/2026).

“Kami sangat senang dan merasa terhormat bahwa Indonesia telah bergabung dengan keluarga BRICS berkat Presiden Prabowo. Indonesia sekarang memiliki chapter yang sangat aktif dalam BRICS Business Council,” ujar Anin.

Pidato tersebut disampaikan dalam sesi mengenai pengembangan perdagangan dan jasa intra-BRICS.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie bersama Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady menyambut kedatangan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam BRICS Business Forum 2026 di New Delhi, India (11/9/2026).



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie berfoto bersama para Pemimpin Negara dan pimpinan organisasi bisnis anggota BRICS di sela-sela penyelenggaraan BRICS Business Forum 2026 di New Delhi, India (11/9/2026).



Anin mengingatkan bahwa BRICS merepresentasikan hampir separuh penduduk dunia dan sekitar 40% perekonomian global. Besarnya kekuatan tersebut, menurut Anin, bukan hanya memberikan kemampuan untuk membentuk masa depan ekonomi dunia, melainkan juga melahirkan tanggung jawab agar kemajuan dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat.

“Ketika kita berbicara tentang BRICS, kita berbicara tentang hampir separuh umat manusia dan sekitar 40% perekonomian dunia. Kita memiliki kekuatan ekonomi untuk membentuk masa depan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang dapat mengambil bagian di dalamnya,” kata Anin.

Anin menjelaskan, pembahasan perdagangan dan jasa tidak boleh berhenti pada gagasan besar. Kerja sama tersebut harus menjawab persoalan praktis yang dihadapi pelaku usaha: apakah perusahaan dapat menemukan mitra di negara anggota lain, memasuki pasar BRICS, memperoleh jasa yang dibutuhkan, serta menerima pembayaran secara cepat dan aman.

Menurut Anin, sektor industri dan jasa tidak dapat dipisahkan. Sebuah pabrik membutuhkan teknologi, pembiayaan, perangkat lunak, logistik, dan tenaga terampil. Karena itu, pengembangan sektor jasa akan memperkuat industrialisasi, sementara pertumbuhan industri akan menciptakan permintaan baru terhadap berbagai layanan.

Bagi Indonesia, kerja sama tersebut sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi di sektor jasa juga dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Anin kemudian menawarkan tiga prioritas untuk memperkuat perdagangan dan jasa intra-BRICS. Pertama, BRICS harus mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. BRICS Business Council perlu mengidentifikasi hambatan konkret yang dihadapi dunia usaha, kemudian menyampaikan usulan penyelesaian yang spesifik kepada pemerintah masing-masing negara.

Pengakuan bersama terhadap kualifikasi profesi tertentu dan kemudahan perjalanan bisnis, lanjut Anin, akan mempercepat transaksi dan investasi. Anin mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS atau BRICS Business Travel Card untuk mendukung mobilitas para pelaku usaha.

Kedua, BRICS perlu menghubungkan dan memperkuat sistem pembayaran antarnegara, terutama pembayaran digital. Anin menilai India, Brasil, dan Tiongkok telah menunjukkan besarnya potensi pembayaran waktu nyata atau real-time payment. Tantangannya sekarang adalah membuat sistem-sistem tersebut dapat terhubung dan digunakan secara efisien untuk transaksi lintas batas.

BRICS, menurut Anin, juga perlu memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan yang sesuai, dengan tetap menjaga keamanan data dan stabilitas sistem keuangan. “Kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial,” tegas Anin.

Usulan tersebut sejalan dengan pembahasan di BRICS Business Forum mengenai konektivitas sistem pembayaran, peningkatan transaksi menggunakan mata uang lokal, dan pembangunan mekanisme pembayaran lintas batas yang cepat, murah, serta aman.

Ketiga, negara-negara BRICS harus meningkatkan investasi pada manusia dan infrastruktur yang menopang perdagangan jasa. Dunia usaha didorong untuk melatih pekerja, membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan membantu perusahaan –terutama usaha mikro, kecil, dan menengah – memanfaatkan kecerdasan buatan.

Anin mengusulkan agar setiap chapter BRICS Business Council memiliki target terukur mengenai jumlah tenaga kerja yang dilatih setiap tahun. New Development Bank juga dapat mengambil peran dalam membiayai jaringan digital, pelatihan, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Menurut Anin, negara anggota baru seperti Indonesia harus ikut menentukan agenda BRICS, bukan sekadar menjadi pasar bagi produk dan perusahaan dari negara-negara yang lebih dahulu bergabung. Setiap kemitraan harus membangun kemampuan domestik sehingga masyarakat di semua negara anggota dapat menjadi penyedia sekaligus pengguna jasa.

Anin menggambarkan integrasi BRICS yang nyata sebagai sebuah ekosistem ketika pelaku usaha mikro dan kecil di Surabaya, Sao Paulo, Durban, hingga Alexandria dapat menemukan pelanggan, menawarkan jasa, serta menerima pembayaran melalui jaringan ekonomi BRICS.

“Itulah ujian bagi integrasi BRICS yang benar-benar bermakna,” ujar Anin yang juga sebagai Ketua BRICS Business Council Indonesia.

Menutup pidatonya, Anin mengingatkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Menurut Anin, kerja sama BRICS harus mempererat hubungan antarnegara berkembang sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan hingga ke tingkat masyarakat dan pelaku usaha kecil.

“Dalam semangat Bandung (KTT Asia-Afrika) 1955, kerja sama yang lebih kuat di dalam BRICS harus menghubungkan satu sama lain. Indonesia siap membantu membangun hubungan (antar-negara BRICS) tersebut. Mari menjadikan masa depan yang kita lihat di BRICS sebagai masa depan yang dapat dinikmati dan dikembangkan bersama,” pungkas Anin



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (lima dari kanan) menghadiri acara tahunan BRICS Business Forum 2026 di New Delhi, India (11/9/2026).



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie berfoto bersama para Perwakilan Pemimpin Organisasi Bisnis Negara anggota BRICS di sela-sela penyelenggaraan BRICS Business Forum 2026 di New Delhi, India (11/9/2026).

RDPU RUU Kadin: Anindya Bakrie Dorong Penguatan Kelembagaan Dunia Usaha dan UMKM Naik Kelas

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie berserta jajaran pengurus dan anggota Kadin menyampaikan pandangan dan masukan Kadin Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (02/09/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Anin sapaan akrabnya, menilai UU Kadin yang berlaku saat ini telah berusia 39 tahun dan lahir pada era sebelum perkembangan ekonomi digital, rantai pasok global, serta fragmentasi ekonomi seperti yang dihadapi saat ini.

“Ini momentum bersejarah untuk memutakhirkannya dan menyempurnakannya untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” kata Anin.

Dalam RDPU tersebut, Kadin Indonesia menyampaikan empat pesan utama dalam pembahasan RUU Kadin. Pertama, UMKM naik kelas melalui satu ekosistem yang mencakup 63 juta UMKM. Seluruh pelaku usaha yang memiliki NIB

diusulkan otomatis masuk dalam ekosistem Kadin sehingga dapat memperoleh akses pelatihan, pendampingan, jaringan, dan pasar.

Kedua, penciptaan lapangan kerja berkualitas. Kadin mengusulkan keterlibatan dalam perumusan kebijakan ekonomi serta penguatan vokasi dan sertifikasi yang diorkestrasi bersama dunia usaha agar penciptaan lapangan kerja berkualitas dapat berlangsung secara sistematis dan terukur.

“Ketiga, mendorong usaha Indonesia mendunia melalui penguatan ekosistem ekspor, dokumen perdagangan, dan diplomasi ekonomi, mulai dari UMKM hingga korporasi,” kata Anin.

Keempat, Kadin sebagai induk dunia usaha, yakni satu induk yang diakui secara hukum dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam kebijakan ekonomi untuk menghadirkan kepastian dan kemudahan berusaha.

Lebih lanjut, Anin menegaskan empat pesan tersebut bukan sekadar rencana. Kadin Indonesia telah menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, perluasan pasar global, serta penguatan peran Kadin sebagai induk dunia usaha.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie memberikan pandangan dan rekomendasi Kadin Indonesia dalam RDPU Kadin Indonesia bersama Komisi VI DPR RI, didampingi jajaran pengurus Kadin Indonesia, di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

Untuk pengembangan UMKM, Kadin menyebut 38 Kadin Provinsi dan 225 anggota luar biasa telah melakukan lebih dari 400 pendampingan dan pelatihan UMKM pada semester pertama 2026. Program tersebut disebut telah menyentuh lebih dari 5.000 UMKM di seluruh Indonesia.

Kadin lanjut Anin juga menjalankan berbagai inisiatif melalui Satuan Tugas (Satgas) Protein Gotong Royong, Satgas Makan Bergizi Gratis Gotong Royong, Forum Ekonomi Kreatif, inisiatif ekonomi syariah, Festival Rakyat di 35 provinsi, serta Kadin Indonesia Institute untuk pelatihan, data, dan penelitian UMKM.

Untuk penciptaan lapangan kerja berkualitas, Kadin membangun platform penciptaan lapangan kerja melalui PT LPK Kadin Indonesia Training Center, Kadin AI Academy, serta pelatihan dan sertifikasi vokasi bersama Kadin Institute Jawa Timur.

"Melalui program Kadin Work Abroad, lebih dari 207 ribu pekerja migran Indonesia difasilitasi melalui ekosistem Kadin pada 2025. Dari total remitansi pekerja migran Indonesia secara nasional sebesar Rp288 triliun pada tahun lalu, sekitar 70 persen disebut berasal dari ekosistem Kadin," kata Anin.

Sementara untuk mendorong usaha Indonesia mendunia, Kadin menerbitkan ATA Carnet dan memfasilitasi dokumen perdagangan ekspor, membentuk Kadin Global Engagement Office untuk memperkuat diplomasi ekonomi, serta terlibat dalam lebih dari 50 misi dagang, pameran, dan business matching sejak 2025.

Sebagai induk dunia usaha, Kadin juga menyalurkan aspirasi dunia usaha melalui Kadin Presidential Briefing, Satgas Debottlenecking, dan audiensi dengan pemerintah. Kadin telah menyelenggarakan 14 Strategic Response Meeting bersama pengurus dan asosiasi/himpunan untuk merespons berbagai situasi terkini, termasuk krisis Selat Hormuz dan pelemahan rupiah.

Namun, Anin mengatakan masih terdapat keterbatasan yang dihadapi Kadin dengan payung hukum yang berlaku saat ini.

Dengan payung Undang-Undang tahun 1987, ada batas yang tidak bisa kami tembus. Di sinilah RUU ini menemukan urgensinya," kata Anin

Dalam RDPU tersebut, Kadin Indonesia menyampaikan 12 poin utama masukan terhadap RUU Kadin, yaitu:

- 1 Kadin diusulkan menjadi lembaga mitra strategis pemerintah yang bersifat sui generis dan independen.
- 2 Kadin menjadi satu-satunya induk dunia usaha di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- 3 Kadin menjadi mitra konsultasi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha, termasuk Musrenbang, RPJMN, RPJMD, serta RUU dan PP terkait dunia usaha.
- 4 Kadin menjadi mitra konsultasi dalam perumusan butir-butir APBN dan APBD yang berkaitan dengan ekonomi dan dunia usaha.
- 5 Penguatan pendanaan berkelanjutan melalui iuran dan sumbangan yang dapat memperoleh deductible hingga super deduction, pengecualian PPh untuk fungsi organisasi, serta hibah pemerintah dan kanal CSR yang dikelola secara transparan dan diaudit.
- 6 Penguatan akses dan pertukaran data ekonomi secara timbal balik antara pemerintah dan Kadin.
- 7 Kadin memperoleh fungsi pembinaan, akreditasi, dan pengukuhan asosiasi dan himpunan.
- 8 Standardisasi bisnis dan dokumen perdagangan, termasuk penerbitan Surat Keterangan Asal sesuai praktik internasional kamar dagang, standar lembaga sertifikasi, pelatihan, serta penegakan kode etik.
- 9 Sistem keanggotaan yang mengatur seluruh pelaku usaha pemilik NIB secara otomatis menjadi anggota Kadin untuk membuka ekosistem pembinaan, pendampingan, dan kemitraan rantai pasok agar UMKM naik kelas.
- 10 Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan/atau mediasi.
- 11 Penyiapan talenta kerja nasional dan global melalui registrasi pemagangan dan ujian kompetensi vokasi, serta pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan calon pekerja migran Indonesia.
- 12 Penguatan diplomasi ekonomi dan jaringan global melalui pendayagunaan bersama Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan atase perdagangan, serta penguatan Indonesian Chamber (IndCham) berbasis diaspora di negara mitra.

Selain itu, Anin mengatakan Kadin Indonesia telah menyosialisasikan dan membahas RUU tersebut dengan seluruh komponen organisasi, mulai dari Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Kadin Provinsi se-Indonesia, hingga asosiasi dan himpunan Anggota Luar Biasa. Seluruh aspirasi tersebut telah dikonsolidasikan sebagai bahan pembahasan bersama dewan.

Proses tersebut juga merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan bersama dewan, termasuk RDPU dengan Badan Legislasi DPR RI pada 17 Juni 2026.

“Kami berterima kasih atas kesinambungan proses legislasi yang konstruktif ini hingga kini berlanjut di Komisi VI (DPR RI),” ujar Anin.

Anin menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI yang diketuai oleh Anggia Erma Rini, khususnya Panitia Kerja Penyusunan RUU Kadin yang diketuai oleh Adisatrya Sulisto, atas dukungan terhadap RUU tersebut.

Kadin Indonesia, kata Anin, juga memohon dukungan agar RUU tersebut dapat menjadi undang-undang yang memajukan seluruh dunia usaha Indonesia.

“Kadin siap hadir dan bekerja sama sebagai mitra aktif di setiap tahap pembahasan, untuk menyukseskan RUU ini bagi kepentingan dunia usaha Indonesia,” katanya.

Hadir jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Ketua Dewan Penasihat Hashim S. Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah (OKP) Erwin Aksa, WKUK Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Politik dan Keamanan Bambang Soesatyo dan WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin.

Hadir pula jajaran Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi di antaranya Ketum Kadin Provinsi Sumatra Selatan Affandi Udji, Ketum Kadin Provinsi Bangka Belitung Ritchie Glen Yapranadi, Ketum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi, Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat Faurani, Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur Bobby Lianto dan Ketum Kadin Provinsi Maluku Muhammad Armin Syarif Latuconsina.



Jajaran pengurus Kadin Indonesia menghadiri RDPU Komisi VI DPR RI dengan Kadin Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

Anindya Bakrie: Transisi Menuju Ekonomi Hijau Butuh Kolaborasi Erat Pemerintah dan Dunia Usaha



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat memberikan sambutan pada kegiatan Kadin Indonesia dan Kadin Indonesia Institute Go-See and Pitch Trip ke PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/8/2026).

Magelang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kadin Indonesia Institute (KII) menggelar Go-See and Pitch Trip ke PT VKTR Sakti Industries dengan mengusung tema “Industri Hijau, Ekonomi Berdaulat: Kadin Indonesia Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8% Berbasis Industri Hijau” di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/8/2026).

Agenda ini menjadi bagian dari program Go-See and Pitch yang diinisiasi KII untuk mempertemukan calon pemasok (supplier) dengan calon pembeli (buyer) dari kalangan dunia usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan apresiasi kepada Menteri Lingkungan Hidup RI/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurut Anin sapaan akrabnya, kehadiran pemerintah menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha.

“Tema kita hari ini, ‘Industri Hijau, Ekonomi Berdaulat’, menurut saya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan pada saat yang sama memastikan pertumbuhan tersebut semakin berkelanjutan,” kata Anin.

Anin mengatakan Indonesia saat ini berada di tengah perubahan besar dalam rantai pasok global, transisi energi, perkembangan teknologi, dan pola investasi dunia. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat perekonomian melalui investasi dan hilirisasi, transisi energi, penguatan rantai nilai dan UMKM, pembangunan infrastruktur dan logistik, serta optimalisasi kerja sama perdagangan internasional.

“Indonesia tidak hanya berpotensi sebagai pasar, tetapi juga sebagai basis produksi, inovasi, dan penciptaan nilai tambah di kawasan,” ujar Anin.

Dalam konteks tersebut, Anin menegaskan komitmen Kadin Indonesia untuk terus mendorong semangat Indonesia Incorporated, sejalan dengan pendekatan yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, konsep tersebut menempatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam membangun kekuatan ekonomi nasional.

“Pemerintah menyediakan regulasi yang tegas, kepastian pasar, dan komitmen jangka panjang. Dunia usaha membawa investasi, inovasi, dan kesediaan mengambil risiko produktif. Sementara akademisi menghadirkan riset terapan yang dapat dihilirkan ke industri serta menyiapkan talenta,” jelas Anin.

Menurut Anin, kegiatan di PT VKTR Sakti Industries merupakan gambaran nyata penerapan konsep Indonesia Incorporated. Melalui Kadin Indonesia Institute, Kadin terus mendorong riset, diskusi, dan dialog mengenai berbagai isu strategis, termasuk transisi energi, kendaraan listrik, keberlanjutan, dan pengembangan industri.

Pemilihan PT VKTR Sakti Industries sebagai lokasi kegiatan juga sejalan dengan fokus Kadin Indonesia dalam mendorong pengembangan industri hijau dan penguatan ekosistem kendaraan listrik nasional. PT VKTR Sakti Industries merupakan perusahaan yang mengembangkan fasilitas perakitan kendaraan listrik nonkomersial berbasis lokal di Indonesia.

"Kami juga melalui Kadin Net Zero Hub mendorong dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi transisi menuju ekonomi rendah karbon. Sementara melalui Kadin Global Engagement Office, kami membawa narasi elektrifikasi Indonesia ke panggung internasional untuk terus membuka peluang investasi, teknologi, dan kolaborasi global yang dapat memperkuat kapasitas industri Indonesia," kata Anin.

Anin menilai kunjungan lapangan seperti Go-See and Pitch Trip penting karena memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak hanya membahas konsep, tetapi juga melihat secara langsung penerapan teknologi dan pengembangan industri di lapangan.

Lebih lanjut, Anin menyoroti pengelolaan sampah sebagai salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Menurut Anin, kebijakan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste-to-energy tidak cukup hanya berfokus pada fasilitas pengolahan di tahap akhir, tetapi juga perlu memperhatikan proses pengumpulan dan pengangkutan sampah.



Suasana acara pembukaan acara Kadin Indonesia dan Kadin Indonesia Institute Go-See and Pitch Trip ke PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/8/2026).



Menteri Lingkungan Hidup RI/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat saat memberikan sambutan pada kegiatan Kadin Indonesia dan Kadin Indonesia Institute Go-See and Pitch Trip ke PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/8/2026).

"Di sinilah terdapat sebuah simpul yang menurut kami sangat penting, yaitu armada pengangkut sampah yang rendah emisi. Kalau kita melihat ekosistem ini secara utuh, ada tiga agenda nasional yang dapat bergerak bersama," kata Anin.

Pertama, dari sisi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Anin menilai pengembangan industri hijau dapat menciptakan rantai nilai baru di dalam negeri.

"Ketika industri kendaraan listrik berkembang, yang tumbuh bukan hanya perusahaan perakitan kendaraan, tetapi juga karoseri, komponen, teknologi, layanan purnajual, tenaga teknis, hingga berbagai pemasok dari sektor UMKM," ujar Anin.

Karena itu, menurut Anin, pengembangan kendaraan listrik komersial perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat industri nasional sekaligus meningkatkan TKDN.

Kedua, dari sisi lingkungan hidup dan transisi energi. Elektrifikasi kendaraan komersial dinilai dapat menjadi bagian dari upaya Indonesia mengurangi emisi sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan.

Anin juga melihat adanya peluang ekonomi dari pengurangan emisi melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Dengan demikian, elektrifikasi armada persampahan dinilai dapat memberikan tiga manfaat sekaligus, yakni meningkatkan efisiensi operasional pemerintah daerah, membuka potensi pendapatan tambahan dari unit karbon, serta membantu mempercepat pencapaian target iklim nasional.



Direktur VKTR, S. Erika Mouna Hamizar memberikan cinderamata kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat (tengah) disaksikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/8/2026).

Ketiga, dari sisi pertumbuhan ekonomi. Anin mengakui salah satu tantangan dalam elektrifikasi adalah tingginya upfront cost atau kebutuhan investasi awal. Namun, perkembangan model bisnis seperti mobility-as-a-service membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai layanan tanpa harus menanggung seluruh beban investasi awal atau belanja modal (capital expenditure/CAPEX).

"Dengan demikian, yang menjadi perhatian bukan hanya harga kendaraan di awal, tetapi total efisiensi yang dapat diperoleh selama kendaraan tersebut beroperasi," kata Anin.

Dalam kesempatan tersebut, Kadin Indonesia juga mengusulkan agar rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dalam pelayanan pengelolaan sampah memuat kewajiban penggunaan truk kompaktor listrik bagi seluruh operator fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) nasional.

"Kewajiban ini akan mengubah Perpres 109/2025 dari arah menjadi realisasi. Regulasi ini juga akan menjadi green readiness Indonesia untuk memaksimalkan pemanfaatan perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara lain, sekaligus mendukung Indonesia bersaing dengan Vietnam, Tailan, dan Tiongkok di pasar global," ujar Anin.

Dari sisi dunia usaha, Anin menyampaikan tiga komitmen Kadin Indonesia. Pertama, mendorong investasi, hilirisasi, dan peningkatan kapasitas industri melalui pengembangan manufaktur kendaraan listrik komersial dalam negeri.

"Kedua, kepada perguruan tinggi, kami akan memperdalam hilirisasi riset ke industri. Talenta dan teknologi adalah dua sisi mata uang yang sama," kata Anin.

Ketiga, Kadin Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Indonesia Incorporated dalam bentuk aksi nyata.

"Bila ekosistem ini kita eksekusi secara utuh, dalam empat tahun ke depan Indonesia akan memiliki 100 persen armada persampahan listrik pada operator PSEL, 80 persen TKDN pada seluruh rantai nilai EV komersial, sekitar 10.000 green jobs baru dari ekosistem EV komersial, serta sekitar 3 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun unit karbon yang dapat diperdagangkan di SRUK, dengan potensi pendapatan tambahan Rp300-700 miliar per tahun bagi ekosistem," jelas Anin.



Kendaraan komersial listrik hasil perakitan PT VKTR Sakti Industries dalam rangkaian Go-See and Pitch Trip di Magelang, Jawa Tengah.

Anin menambahkan, Indonesia saat ini telah memiliki berbagai building blocks untuk membangun ekosistem industri hijau. Tantangan berikutnya adalah menghubungkan seluruh elemen tersebut agar dapat bekerja secara terintegrasi.

“Kita sudah punya semua building blocks-nya. Tantangan kita sekarang adalah menghubungkan seluruh building blocks tersebut menjadi satu ekosistem yang bekerja bersama. Jika kita berhasil, apa yang kita lihat hari ini di Magelang dapat menjadi model yang direplikasi di berbagai daerah di Indonesia,” terang Anin.

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup RI/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengapresiasi PT VKTR Sakti Industries sebagai pionir pabrik perakitan kendaraan komersial listrik berbasis Completely Knocked Down (CKD) pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran fasilitas perakitan ini dinilai strategis untuk memperkuat kapasitas manufaktur dalam negeri, mendorong efisiensi energi, mempercepat transfer teknologi, serta meningkatkan TKDN.

“Dari total sekitar 172,9 juta kendaraan bermotor yang ada di Indonesia saat ini, populasi kendaraan listrik baru mencapai sekitar 274,8 ribu unit atau 0,16 persen. Angka ini menunjukkan ruang peluang transformasi yang masih sangat besar bagi industri nasional,” kata Jumhur.

Namun, ia mengingatkan bahwa transisi ke kendaraan listrik bukan sekadar mengganti mesin berbahan bakar fosil, melainkan membangun ekosistem industri yang mencakup riset, rantai pasok, baterai, hingga daur ulang berbasis ekonomi sirkular.

Selain kesiapan teknologi, Jumhur menggarisbawahi pentingnya aspek kesiapan dan integrasi sosial (social preparation dan social integration) serta keselamatan kerja (Zero Accident).

“Pembangunan industri harus berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan guna memperoleh social license to operate dan mencegah konflik sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jumhur menyoroti penerapan Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peningkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang mendorong dunia usaha menerapkan konsep Beyond Compliance. Melalui regulasi dan penerapan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) ini, perlindungan lingkungan hidup diubah dari cost center menjadi value creator yang meningkatkan daya saing industri di pasar global.

“Mari ‘tobat ekologis’ dengan mengubah paradigma pembangunan dari eksploitasi menuju keberlanjutan demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Jumhur.



Kementerian Lingkungan Hidup RI/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/8/2026).



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mendampingi Menteri Lingkungan Hidup RI/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat saat berkunjung ke PT VKTR Sakti Industries, di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/8/2026).



Menteri Lingkungan Hidup RI/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat saat meninjau tempat produksi PT VKTR Sakti Industries, di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/8/2026).



Display produk angkutan berat PT VKTR Sakti Industries, di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/8/2026).

Kabar Quick Wins Kadin

"SMK Go Global Jatim" Tak Sekadar Kirim Pekerja, Tapi Siapkan SDM Profesional untuk Pasar Dunia



Penandatanganan MoU antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) RI dan Kadin Institute Jatim mengenai sinergi ekosistem vokasi pekerja migran Indonesia, di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Provinsi Jatim, Rabu (12/08/2026).

Surabaya – Provinsi Jawa Timur (Jatim) mulai memperkuat strategi penyiapan pekerja migran dengan mengubah pendekatan dari sekadar mengirim tenaga kerja ke luar negeri menjadi menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian, sertifikasi, dan kemampuan beradaptasi sesuai kebutuhan pasar kerja global.

Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan Sosialisasi dan Pemetaan Kompetensi SMK Go Global Jawa Timur 2026 bertema "Sinergi Ekosistem Vokasi Pekerja Migran Indonesia, Wujudkan SDM Unggul Kelas Dunia" di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Provinsi Jatim, Rabu (12/08/2026).

Kegiatan yang merupakan kolaborasi Kadin Provinsi (Jatim), Kadin Institute dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) RI itu mempertemukan berbagai unsur vokasi. Mulai dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Balai Latihan Kerja (BLK), Asosiasi Vokasi hingga perwakilan SMK.

Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto, mengatakan aspek legalitas harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi. Calon pekerja migran harus melalui jalur resmi dan memiliki bekal keterampilan sebelum diberangkatkan.

"Yang penting sekarang tenaga harus legal, terdaftar pada dinas tenaga Kerja dan melalui jalur resmi. Bukan ilegal. Kemudian dibekali kompetensi, baik kompetensi teknis maupun nonteknis," tegas Adik.

Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan budaya negara tujuan juga tidak kalah penting. Pekerja yang tidak memahami karakter dan budaya di negara tujuan berpotensi mengalami culture shock yang dapat memengaruhi perilaku dan keberlangsungan pekerjaan.

"Kalau tidak tahu ilmunya, dia bisa mengalami culture shock. Ada perubahan budaya di sana yang bisa berpengaruh terhadap perilaku. Kalau tidak cocok, akhirnya tidak kerasan dan bisa muncul persoalan," ujarnya.



Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto memberikan sambutan dalam Sosialisasi dan Pemetaan Kompetensi SMK Go Global Jawa Timur 2026 di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Provinsi Jatim, Rabu (12/08/2026).



Foto bersama jajaran pengurus Kadin Provinsi Jatim, Kadin Institute dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) RI dengan para peserta Sosialisasi dan Pemetaan Kompetensi SMK Go Global Jawa Timur 2026 di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Provinsi Jatim, Rabu (12/08/2026).

Selain adaptasi, persoalan kompetensi juga dapat menjadi penyebab pekerja mengalami masalah di tempat kerja. Karena itu, pemerintah mendorong pekerja migran memiliki sertifikat kompetensi sebelum diberangkatkan.

“Kalau dia tidak memiliki skill dan tidak dibekali keterampilan, di sana tidak bisa apa-apa dan bisa dipulangkan. Sekarang mulai diminimalkan. Pemerintah mendorong semua yang berangkat harus memiliki sertifikat kompetensi untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan,” kata Adik.

Sementara itu, Direktur Kadin Institute Provinsi Jawa Timur Nurul Indah Susanti, mengatakan pemetaan kompetensi menjadi langkah penting agar calon pekerja migran tidak hanya memiliki kemampuan dasar, tetapi benar-benar disiapkan berdasarkan kebutuhan negara penempatan.

“Sekarang job-nya banyak, sehingga job ini harus di-matchingkan. Tugas kita memetakan kompetensi pekerja yang akan dikirim ke luar negeri dengan kompetensi yang diinginkan oleh negara penempatan,” ujar Nurul.

Menurut dia, tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri harus memiliki tiga modal utama, yakni keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Karena itu, pelatihan perlu menggabungkan kemampuan teknis dengan kemampuan nonteknis, termasuk karakter dan soft skill.

Kebutuhan tenaga kerja juga semakin spesifik. Di sektor manufaktur, misalnya, pasar kerja membutuhkan tenaga untuk packing, screwing, fitting, pengelasan industri hingga pengoperasian teknologi. Sementara sektor pertanian membutuhkan tenaga untuk penanaman, pemeliharaan hingga pemanenan.

Untuk sektor kesehatan, kebutuhan mencakup caregiver, caretaker dan tenaga perawatan lansia. Sedangkan pada sektor domestik, pekerjaan mulai diarahkan berdasarkan jabatan dan kompetensi seperti housekeeper, childcare, babysitter, family cook dan family driver.

Nurul menegaskan, perubahan tersebut menunjukkan pekerja migran kini semakin diarahkan sebagai tenaga profesional berdasarkan jabatan, bukan lagi sekadar dikategorikan sebagai pekerja formal atau informal.

“Sekarang sudah mengarah kepada jabatan. Housekeeper, caretaker, babysitter, childcare. Itu mengarah kepada jabatan. Jadi bukan lagi penata laksana rumah tangga, tetapi jabatan-jabatan yang sesuai dengan kompetensi,” jelasnya.

Peluang pasar kerja global pun dinilai semakin terbuka. Jepang, misalnya, membutuhkan tenaga caregiver, sedangkan Jerman memiliki kebutuhan di sektor hospitality, termasuk cook dan bidang makanan. Sejumlah negara lain seperti Taiwan, Korea, Singapura, Malaysia, Brunei, Australia dan Turki juga menjadi pasar potensial.

Provinsi Jatim dinilai memiliki modal kuat untuk mengambil peluang tersebut karena memiliki basis pendidikan vokasi yang besar. Lulusan SMK, politeknik maupun pendidikan vokasi lainnya didorong untuk dipersiapkan sejak awal agar kompetensinya sesuai kebutuhan negara tujuan.

“Yang kita siapkan bukan hanya skill, tetapi juga knowledge dan attitude. Kemampuan teknis harus siap, kemampuan nonteknis juga harus disiapkan, terutama pengembangan karakter dan soft skill,” kata Nurul.

Pemerintah Dorong Ekosistem Vokasi Terintegrasi

Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia KP2MI RI Abri Danar Prabawa, mengatakan program SMK Go Global merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing dan terserap di pasar kerja internasional.

“SMK Go Global ini salah satu bentuk program pemerintah yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang nantinya mampu bersaing dan terserap di pasar kerja global,” ujar Abri.

Menurut Abri, program tersebut tidak dapat berjalan sendiri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga vokasi, SMK dan LPK perlu membangun ekosistem yang terintegrasi, mulai dari pemetaan calon tenaga kerja, pelatihan hingga sertifikasi.

“Kita harus membangun ekosistem yang satu. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita perlu bekerja bersama untuk menyiapkan SDM yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global,” katanya.

Provinsi Jatim, lanjutnya, memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pusat penyiapan pekerja migran berkualitas. Jumlah lembaga vokasi dan SMK yang besar menjadi kekuatan yang perlu dioptimalkan. Namun, masih ada sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama kompetensi spesifik, sertifikasi dan kemampuan bahasa asing. Dengan bekal tersebut, pekerja migran asal Jawa Timur diharapkan mampu naik kelas menjadi tenaga profesional dengan kompetensi yang diakui di negara tujuan.

“Kita memiliki modalitas yang sangat besar dan keunggulan talenta yang cukup baik. Hanya saja, kita perlu menguatkan kompetensi mereka. Salah satunya adalah kompetensi bahasa asing,” jelas Abri.

Karena itu, pemetaan kompetensi akan diarahkan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri, bidang pekerjaan yang diminati serta kompetensi yang telah dimiliki. Data tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan pelatihan dan peningkatan kompetensi.

“Kita ingin tahu berapa yang berminat bekerja ke luar negeri, minatnya apa, kompetensinya apa, lalu kita upgrade dan kita siapkan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk menyiapkan SDM yang unggul untuk kelas dunia,” pungkasnya.

Melalui SMK Go Global, Jawa Timur diharapkan tidak hanya menjadi daerah pemasok pekerja migran, tetapi berkembang sebagai pusat penyiapan tenaga kerja terampil yang mampu memenuhi kebutuhan industri internasional. Sinergi pendidikan vokasi, lembaga pelatihan, sertifikasi, pemerintah dan dunia usaha menjadi fondasi untuk memastikan tenaga kerja yang dikirim benar-benar kompeten, legal, dan siap bersaing di pasar global.

Kabar Quick Wins Kadin

Kadin NTT Dukung Pembangunan Dapur MBG 3T, 60 Titik di Timor Tengah Selatan



Ketua Umun Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Bobby Lianto

Kupang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat dukungan terhadap program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) untuk memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat wilayah terpencil.

Ketua Umun Kadin Provinsi NTT Bobby Lianto mengatakan, program tersebut mendukung upaya pemerintah menangani stunting sekaligus menggerakkan perekonomian daerah setempat.

Menurut Bobby, terdapat 60 titik Dapur MBG 3T di Timor Tengah Selatan yang sebelumnya belum mendapatkan pengelola pembangunan. Kondisi geografis menjadi tantangan utama karena sejumlah lokasi harus ditempuh melewati sungai, pegunungan, serta akses jalan yang terbatas.

"Ini adalah satu panggilan bagi kita semua," ujar Bobby di Kupang pada 14 Agustus 2026.

Bobby menjelaskan alasan Kadin mengambil tanggung jawab pembangunan dapur tersebut. Kadin Provinsi NTT bersama jejaringnya kemudian membentuk konsorsium untuk membangun 60 titik yang sebelumnya berpotensi dikembalikan kepada pemerintah pusat.

Selain Timor Tengah Selatan, dukungan pembangunan juga mencakup Rote, Sabu, Ende, Alor, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Manggarai di NTT. Secara keseluruhan, hampir 70 unit Dapur MBG 3T masih dalam pembangunan dan belum beroperasi sampai saat ini semuanya.

"Tetapi itulah tantangan yang harus kita ambil demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Bobby.

Pendanaan pembangunan tersebut, menurut Bobby, masih berasal dari dunia usaha, investor, serta anggota Kadin yang berkomitmen mendukung program.

Program dapur MBG 3T kata Bobby, juga dinilai membuka peluang bagi petani dan peternak lokal memasok kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Bobby menyebut pasokan lokal membutuhkan proses bertahap karena kebutuhan makanan harus tersedia konsisten dan tidak boleh terus terputus.

"NTT sangat memerlukan yang namanya dapur MBG 3T," ujar Bobby.

Ia menilai program tersebut menjawab persoalan stunting yang tinggi di daerah ini. Ia berharap pengelola BGN segera menyelesaikan proses pembaruan sistem sehingga dapur yang telah dibangun dapat kembali beroperasi secepatnya.

Rakornas Gabungan Kadin, Fokus Pembenahan Regulasi Dunia Usaha hingga Penguatan Kelembagaan



Jajaran pengurus Kadin Indonesia bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah (OKP) serta Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana berfoto bersama usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gabungan yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/09/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah (OKP) serta Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana mendorong penguatan kelembagaan dan pembenahan regulasi dunia usaha melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gabungan yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/09/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, yang hadir secara daring melalui rekaman video mengatakan Rakornas tersebut diharapkan menghasilkan usulan, keputusan, dan rekomendasi yang dapat dibawa ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin pada akhir Oktober 2026. Anin juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang OKP Erwin Aksa serta WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Azis Syamsuddin yang memimpin masing-masing bidang.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada dua WKUK yang handal, WKUK OKP Erwin Aksa dan WKUK Hukum dan HAM Sarana/Prasarana Azis Syamsuddin. Semoga Rakornas ini bisa menghasilkan suatu usulan, keputusan, rekomendasi yang bagus, yang bisa kita bawa ke Rapimnas di bulan Oktober akhir,” ujar Anindya.

Menurut Anin, hasil Rakornas juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses reformasi Kadin agar kelembagaan organisasi semakin kuat, bermanfaat, dan mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas yang hadir sebagai narasumber utama Rakornas mengatakan, pihaknya terbuka terhadap masukan dunia usaha terkait regulasi dan registrasi perusahaan, termasuk kebijakan yang masih dirasakan memberatkan pelaku usaha.

“Ini sebuah kebahagiaan, kehormatan saya diundang oleh Kadin untuk bicara soal aspek regulasi dan registrasi perusahaan. Kami mendengar dan sekaligus juga berusaha untuk melakukan berbagai macam kebijakan yang mungkin masih dirasakan memberatkan bagi teman-teman Kadin dan kami terbuka melakukan dialog itu,” kata Supratman.

Supratman menilai Kadin sebagai mitra strategis pemerintah memiliki peran penting dalam memperkuat sinergi dengan Kementerian Hukum guna menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang lebih baik.

“Karena harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto menginginkan dunia usaha ini harus diberi proteksi dan juga regulasi yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menegaskan Kementerian Hukum RI siap memperkuat kerja sama dengan Kadin dan seluruh ekosistem dunia usaha, termasuk pekerja, untuk bersama-sama mendorong pembangunan Indonesia.

“Karena itulah saya datang dan menjamin kepada teman-teman anggota Kadin untuk kami berpihak kepada pengusaha dan tentu juga bersama-sama dengan seluruh ekosistemnya di dalamnya ada pekerja untuk bisa bersama-sama membangun Indonesia,” ujar Supratman.

Sementara itu, WKUK Bidang OKP Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan Rakornas gabungan digelar pada momentum yang tepat, seiring dengan konsolidasi Kadin menuju penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

“Penguatan kelembagaan bukan sekadar usaha administratif. Ini adalah syarat penting agar suara dunia usaha dari Sabang sampai Merauke dapat terkonsolidasi menjadi satu kekuatan yang utuh sejalan dengan visi besar kita menuju Indonesia Emas 2045,” kata Erwin.



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gabungan yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/09/2026)

Erwin menyampaikan enam agenda utama yang menjadi fokus Bidang OKP. Agenda tersebut mencakup penguatan koordinasi dan sinergi program kerja antara Kadin Indonesia, Kadin Provinsi, serta Kadin Kabupaten/Kota, penguatan akuntabilitas dan evaluasi kinerja serta penegakan disiplin organisasi.

Selain itu, Kadin juga mendorong penguatan integritas kepemimpinan dan transparansi organisasi, penataan hierarki organisasi dan mekanisme pergantian antar-waktu, digitalisasi serta validitas keanggotaan melalui administrasi Kartu Tanda Anggota (KTA), hingga standardisasi layanan Kadin kepada anggota.

"Penguatan kelembagaan tidak boleh berhenti pada pembenahan struktur dan administrasi. Kita harus pastikan bahwa organisasi yang semakin tertib juga memiliki program kerja yang semakin aktif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota serta dunia usaha di daerah," ujarnya.

Menurut Erwin, penguatan organisasi juga perlu diikuti dengan persiapan agenda seperti Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) dan Musyawarah Provinsi (Musprov) yang lebih terstruktur. Setiap agenda organisasi, kata dia, perlu menghasilkan output yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Kadin juga akan mendorong ukuran kinerja Kadin Provinsi yang lebih jelas dan terukur, mulai dari ketersediaan dan penguatan sekretariat, kelengkapan perangkat organisasi, aktivitas dan kapasitas organisasi, hingga kemampuan membangun hubungan serta sinergi dengan pemerintah daerah.

"Dengan ukuran kinerja yang jelas ini, kita dapat melihat bukan hanya apakah organisasi kita terbentuk, tapi juga sejauh mana organisasi tersebut hidup, bergerak dan memberikan manfaat," katanya.

Erwin menambahkan Kadin Provinsi perlu menjadi penghubung yang semakin kuat dengan Kadin Kabupaten dan Kota serta asosiasi, sehingga seluruh kekuatan dunia usaha di daerah dapat terhubung dalam satu ekosistem Kadin

Perluasan basis keanggotaan, khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM), juga menjadi bagian dari penguatan organisasi. Menurut Erwin, pola keanggotaan yang inklusif dengan biaya yang tidak membebani diperlukan untuk membangun basis anggota yang luas dan terukur.

"Kita ingin membangun basis data dan jumlah anggota yang besar, terukur dan dapat dimonitor, sehingga kita benar-benar mengetahui siapa yang kita representasikan, berapa besar kekuatan kita, dan bagaimana kita dapat memberikan pelayanan yang lebih tepat kepada anggota," ujarnya.

Di bidang hukum dan regulasi, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia Azis Syamsuddin mengatakan Rakornas menjadi forum untuk bertukar pandangan mengenai regulasi dan administrasi perusahaan, termasuk pelaporan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

"Kita melakukan ini untuk memberikan suatu wawasan dan tukar-menukar pikiran dengan teman-teman berkenaan dengan SABH, pelaporan keuangan setiap tahunnya yang dilakukan dengan atas usulan dan penerjemahan dari Undang-Undang PT terhadap Permenkum 49 Tahun 2025," kata Azis.

Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah penyeragaman biaya notaris dalam pelaporan SABH. Azis mengatakan kepastian tarif diperlukan agar biaya tersebut tidak memberatkan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan usaha yang baru berkembang.

Ia menyebut pembahasan mengenai tarif tersebut diharapkan dapat segera memperoleh kepastian dalam satu hingga dua minggu ke depan. Apabila belum terdapat kepastian tarif dasar dari Ikatan Notaris Indonesia, Menteri Hukum RI akan mempertimbangkan penetapan tarif berdasarkan klasifikasi usaha.



Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas (kiri) dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia, M. Azis Syamsuddin saat menjadi moderator pada diskusi panel bertajuk "Memperkuat Kepastian Hukum dan Layanan Korporasi untuk Mendorong Daya Saing Dunia Usaha" dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gabungan yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/09/2026).



Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia, M. Azis Syamsuddin (kanan) bersama Menteri Hukum RI Supratman, Andi Agtas (kiri) saat menjadi pembicara pada sesi I: Panel High-Level Policy Dialogue

“Apabila nanti harga-harga dari pihak Ikatan Notaris Indonesia tidak memberikan suatu masukan kepastian terhadap tarif dasar untuk akte pelaporan itu, maka Pak Menteri akan mengeluarkan SK bahwa tarif untuk klasifikasi pengusaha kecil harus misalnya Rp500 ribu atau berapa yang akan ditentukan, untuk pengusaha menengah berapa dan lain sebagainya,” ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi Panel II bertajuk “Kebijakan Pembangunan dan Penguatan Iklim Usaha” yang menghadirkan Direktur Pembiayaan Strategis dan Inovatif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Novie Andriani, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa sebagai narasumber serta Wakil ketua Umum Bidang Perencanaan Nasional Kadin Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi Panel III yang membahas RUU Kadin, serta Sesi IV berupa Rapat Internal Pleno Kadin dan pembahasan RUU Kadin.

Hadir dalam acara tersebut WKUK Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya, serta jajaran Ketua Umum, pengurus dan Direktur Eksekutif Kadin Provinsi seluruh Indonesia.



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia, M. Azis Syamsuddin saat memberikan paparan dalam Forum Direktur Eksekutif Kadin Seluruh Indonesia, di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Kadin Resmikan Logo Pemenang Sayembara Logo HUT Ke-58 Kadin Indonesia

Design Logo 58th
Kadin Indonesia



Visualisasi logo pemenang Sayembara Logo HUT ke-58 Kadin Indonesia yang ditampilkan pada acara Rakornas Gabungan Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah (OKP) serta Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia, di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia telah menyelenggarakan Sayembara Desain Logo dan Lomba Foto UMKM HUT Ke-58 Kadin Indonesia yang berlangsung sepanjang Agustus 2026.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko menyebutkan, dari 426 karya logo yang diseleksi, telah terpilih 10 karya terbaik, termasuk tiga pemenang utama yang menjadi juara.

“Para peserta berasal dari berbagai daerah di seluruh provinsi. Kami sangat mengapresiasi partisipasi masyarakat yang mengikuti sayembara desain logo ini dan ikut memberikan makna bagi perayaan HUT Ke-58 Kadin Indonesia,” kata Taufan usai mengumumkan para pemenang di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gabungan Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah (OKP) dan Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia, di Jakarta (11/9/2026).

Taufan mengatakan, sayembara desain logo ini menjadi wujud apresiasi terhadap kreativitas anak bangsa, sekaligus membuka ruang partisipasi publik untuk ikut memaknai peran penting Kadin sebagai pelaku penggerak ekonomi nasional.

“Logo yang diangkat adalah 58 (MAPAN). Penilaian desain logo difokuskan pada beberapa hal, di antaranya mencerminkan nilai kebersamaan, semangat optimisme, serta peran strategis Kadin dalam pembangunan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Tiga peserta dengan karya logo terbaik mendapatkan hadiah senilai Rp10 juta untuk Juara 1, Rp5 juta untuk Juara 2, dan Rp3 juta untuk Juara 3. Total 10 karya terbaik mendapatkan e-sertifikat penghargaan.

Berikut adalah daftar lengkap para pemenang Sayembara Desain Logo HUT Ke-58 Kadin Indonesia:

- **Juara 1:** Muhammad Apit Adi Saputra – Bandar Lampung, Lampung
- **Juara 2:** Hardhian Prasetya – Klaten, Jawa Tengah
- **Juara 3:** Giant Tahta Pahlawan – Bogor, Jawa Barat

Tujuh Finalis Karya Terbaik:

- Widya Nuriama Firdansyah
- Hendhy Ramandha
- Muh Aswin
- Muhammad Rizki Nurfauzi
- Akhmad Nanang Imrosi
- Herwin Kurniawan
- Wenda Muharja



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah, Erwin Aksa (Kiri) dan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Taufan Eko Nugroho R. (Kanan) pada saat Rakornas Gabungan Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah (OKP) dan Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia, di Jakarta (11/9/2026).

Sementara itu, Ketua Panitia Sayembara Logo dan Lomba Foto UMKM HUT ke-58 Kadin Indonesia sekaligus Ketua Komite Tetap Kemitraan Kelembagaan Nasional Bidang OKP Kadin Indonesia, Yuliandre Darwis, mengatakan logo terbaik yang terpilih akan menjadi identitas visual resmi Kadin Indonesia.

"Dan logo resmi itu akan digunakan di dalam seluruh rangkaian kegiatan Kadin Indonesia setahun ke depan," kata Yuliandre.

Filosofi Logo

Secara keseluruhan, logo terbaik Karya Muhammad Apit Adi Saputra menggambarkan Kadin Indonesia yang berakar kuat pada jati diri bangsa, bergerak mengikuti dinamika zaman, terhubung melalui kolaborasi, dan terus bertumbuh menuju kemapanan yang berkelanjutan. "MAPAN" bukan sekadar tujuan, tetapi sebuah sikap dan perjalanan: maju dalam langkah, adaptif menghadapi perubahan, produktif menciptakan nilai, andal dalam menjalankan peran, dan tetap berorientasi pada kemajuan nasional.

Unsur Kepala Garuda dan Bendera Indonesia merepresentasikan Kadin sebagai bagian integral dari perjalanan ekonomi Indonesia. Bentuk ombak menggambarkan dunia usaha yang selalu bergerak dan menghadapi perubahan.

Persilangan bentuk infinity juga menggambarkan kolaborasi dan sinergi yang terus berputar dan menghasilkan nilai baru. Bentuk Lingkaran menjadi representasi dari kondisi yang ingin dicapai melalui perjalanan Kadin, sebuah ekosistem dunia usaha yang semakin solid, terhubung, dan memiliki fondasi yang kuat.

Yuliandre menambahkan, untuk pemenang Lomba Foto UMKM HUT ke-58 Kadin Indonesia akan diumumkan di acara HUT Kadin pada 24 September 2026 mendatang.



Design Logo terpilih untuk perayaan Hari ulang Tahun (HUT) Kamar Dagang dan Industri (kadin) Indonesia ke-58

Kadin Gelar Rakor Empat Bidang, Fokus Perkuat Rantai Pasok Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie berfoto bersama jajaran pengurus Kadin Indonesia bidang Perekonomian, Pangan, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Bidang Pengembangan Ekspor, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (03/09/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Gabungan Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Perekonomian, Pangan, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Bidang Pengembangan Ekspor dengan tema “Memperkuat Daya Saing Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8%” di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (03/09/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan empat bidang tersebut tidak dapat dipisahkan karena seluruhnya berkaitan dengan keberlangsungan rantai pasok, terutama di daerah.

“Memang pangan itu menjadi primadona, swasembada pangan. Yang pertama kali di dalam Kadin itu ada WKUK Pangan juga. Tadi kita fokus dari segala macam bidang,” kata Anin.

Selain ketahanan pangan, pembahasan juga diarahkan pada penguatan ekonomi secara umum, pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, serta percepatan ekspor.

“Pertama tentunya secara umum perekonomian. Tapi juga ada WKUK yang fokus pada bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah. Dan juga sampai kepada akselerasi daripada ekspor. Nah itu semua satu-kesatuan di dalam rantai pasok,” ujar Anin.

Anin menilai penguatan rantai pasok tidak cukup hanya dilakukan dari tingkat pusat. Pasalnya, sebagian besar aktivitas ekonomi anggota Kadin, khususnya yang bergerak di sektor pangan, justru berada di daerah.

“Bagaimana anggota Kadin yang bukan saja di pusat, bahkan lebih banyak, kalau dari pangan, ekonominya di daerah,” tambah Anin.

Sementara itu, narasumber utama Rakor Gabungan Empat Bidang Kadin Indonesia yaitu Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menuturkan, pemerintah meminta dukungan Kadin selaku mitra kerja dalam membangun Asta Cita Swasembada Pangan.

“Pemerintah sangat sekali minta dukungan dari Kadin di dalam membangun swasembada pangan kita,” kata Hanif.

Hanif menilai, kolaborasi pemerintah dan Kadin dibutuhkan untuk membangun sejumlah komoditas pangan, mulai dari tebu atau gula, susu, garam, bawang merah, bawang putih, hingga kedelai.

“Pemerintah berharap Rakor Kadin kali ini mampu menghasilkan rumusan yang dapat diimplementasikan, termasuk dalam penyederhanaan regulasi dan pemberian kepastian usaha,” pungkas Hanif



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Gabungan Bidang Perekonomian, Pangan, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Bidang Pengembangan Ekspor dengan tema “Memperkuat Daya Saing Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8%” di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (03/09/2026).



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Kadin Indonesia sekaligus Ketua Penyelenggara Franky O. Widjaja di sela-sela Rapat Koordinasi Gabungan Bidang Perekonomian, Pangan, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Bidang Pengembangan Ekspor di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (03/09/2026).



Kiri ke kanan: Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto, WKUK Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq, WKUK Bidang Perekonomian Kadin Indonesia, Franky O. Widjaja dan WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe saat menghadiri Rakor Gabungan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (03/09/2026).

Franky menyampaikan, terdapat sejumlah agenda yang dapat didorong bersama untuk mencapai target tersebut, antara lain pengembangan investasi, peningkatan ekspor, ketahanan pangan, ketahanan energi, perkembangan digitalisasi, serta pembangunan infrastruktur.

“Hal-hal yang terkait dengan pengembangan investasi, peningkatan ekspor, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan perkembangan digitalisasi serta pembangunan infrastruktur harus diwujudkan dalam kolaborasi yang nyata,” kata Franky.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar sinergi yang terbangun dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar dan kuat bagi dunia usaha serta perekonomian nasional.

Selain memperkuat sinergi antar-pelaku usaha, Franky menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah.

“Kami sangat mengapresiasi berbagai langkah pemerintah dalam mendukung dunia usaha,” ujarnya.

Ke depan, Franky berharap sejumlah aspek dapat terus diperkuat, termasuk ketersediaan bahan baku yang kompetitif, kebijakan regulasi, kemudahan perizinan dan berusaha, dukungan investasi dan hilirisasi, serta infrastruktur dan konektivitas.

“Karena itu, mari kita terus menjaga kolaborasi antara pemerintah dan tim yang menaungi dunia usaha untuk membawa Indonesia semakin maju dan kompetitif. Demi mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen,” kata Franky.

Turut hadir pimpinan sidang Rakor Gabungan lainnya, yaitu WKUK Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe.

Hadir pula sebagai narasumber, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI Fajarini Puntodewi dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara RI Ferry Irawan.

James Riady: Indonesia Tak Kekurangan Destinasi, tapi Kemampuan Mengubah Potensi Menjadi Devisa



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady saat memberi sambutan pada Kadin Monthly Diplomatic Economic Breakfast bertajuk "Tourism: Indonesia's Next Growth Engine Jobs, Investment, Region and The World" di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta, Jumat (11/09/2026).

Jakarta – Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sulit ditandingi negara lain, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah keunggulan tersebut menjadi kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan lapangan kerja. Karena itu, pembangunan pariwisata harus difokuskan pada penguatan ekosistem yang menghubungkan destinasi dengan transportasi, akomodasi, promosi, layanan, serta pengalaman wisata berkualitas.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady dalam pembukaan Kadin Monthly Diplomatic Economic Breakfast bertajuk "Tourism: Indonesia's Next Growth Engine Jobs, Investment, Region and The World" di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta, Jumat (11/09/2026).

Forum itu mencatat kehadiran perwakilan dari 67 negara, terdiri atas 39 duta besar dan 28 anggota korps diplomatik lainnya. Menurut James, jumlah tersebut merupakan partisipasi diplomatik terbesar sejak Kadin menyelenggarakan forum sarapan ekonomi bulanan.

"Indonesia sesungguhnya tidak memiliki masalah dengan aset pariwisata. Kita menghadapi persoalan konversi," kata James.

Persoalan yang dimaksud adalah bagaimana Indonesia mengubah keindahan alam menjadi destinasi yang mudah dijangkau, aksesibilitas menjadi pengalaman berwisata, pengalaman menjadi belanja wisatawan, belanja menjadi investasi, serta investasi menjadi lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

James menegaskan, sebagian besar modal dasar pariwisata Indonesia telah tersedia. Indonesia memiliki pantai, laut, lokasi selam dan selancar kelas dunia, ribuan pulau, gunung berapi, hutan, kekayaan budaya, keragaman kuliner, serta masyarakat yang dikenal ramah.

Namun, kekayaan tersebut belum selalu ditopang ekosistem pariwisata yang memadai. Indonesia masih perlu memperkuat konektivitas penerbangan, kapasitas hotel, transportasi publik, pusat perbelanjaan, restoran, penyelenggaraan acara, kebersihan destinasi, kemudahan perjalanan, konektivitas digital, dan konsistensi promosi.

"Potensi itu sudah kita bicarakan selama puluhan tahun. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi jumlah kedatangan wisatawan, masa tinggal yang lebih panjang, belanja yang lebih besar, investasi, lapangan kerja, dan kunjungan berulang," ujarnya.

Di tengah tekanan pertumbuhan ekonomi global, tingginya biaya modal, dan terbatasnya ruang fiskal pemerintah, James menilai Indonesia harus menemukan sektor-sektor yang dapat bergerak dan memberikan hasil lebih cepat. Selain kecerdasan buatan dan teknologi serta sektor perumahan, pariwisata merupakan salah satu peluang utama yang harus mendapat tempat lebih besar dalam strategi pertumbuhan nasional.



Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya membangun pariwisata berkualitas dalam Kadin Monthly Diplomatic Economic Breakfast bertajuk "Tourism: Indonesia's Next Growth Engine Jobs, Investment, Region and The World" di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta, Jumat (11/09/2026).

Berbeda dari pembangunan industri baru, Indonesia tidak perlu menciptakan aset pariwisata dari awal. Yang diperlukan adalah keberanian membangun infrastruktur pendukung, menyederhanakan regulasi, memperbaiki pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengemas kekayaan alam dan budaya menjadi produk wisata yang menarik bagi pasar internasional.

Menurut James, pembangunan pariwisata tidak selalu harus dimulai dengan proyek berskala besar. Perubahan cara mengemas sebuah stasiun MRT, pembukaan satu rute penerbangan baru, pembangunan marina, penyempurnaan kebijakan visa, kampanye media sosial, pengembangan kawasan belanja, atau perbaikan akses dari bandara dapat memberikan dampak ekonomi yang besar.

Forum tersebut juga menghadirkan sejumlah pelaku usaha untuk menyampaikan masukan praktis. Pendiri Tomorrow Retail Group Kenny Koesoemo membahas perkembangan wisata perkotaan di Jakarta, terutama meningkatnya kunjungan wisatawan Asia Tenggara, khususnya dari Malaysia, untuk menikmati pusat kuliner, kawasan Blok M, pusat perbelanjaan, gaya hidup, serta perjalanan menggunakan kereta cepat Whoosh menuju Bandung.

"Fenomena tersebut, kata James, memperlihatkan perubahan cara wisatawan memilih destinasi. Arus wisata tidak lagi hanya digerakkan kampanye konvensional, tetapi juga oleh konten yang tersebar melalui TikTok dan Instagram. Ketika sebuah tempat, makanan, atau pengalaman menjadi viral, ribuan orang dapat terdorong untuk datang dan merasakan pengalaman serupa.

Perspektif industri perjalanan wisata internasional disampaikan Wakil ketua Umum (WKU) Bidang Pariwisata Kadin Indonesia sekaligus CEO Pacto Raty Ning. Sementara itu, perwakilan diplomatik Singapura dan Qatar diharapkan berbagi pengalaman mengenai pembangunan pariwisata di negara masing-masing.

James mengatakan, Singapura berhasil membangun salah satu ekonomi pariwisata paling maju di dunia meskipun memiliki sumber daya alam yang terbatas. Keberhasilan itu ditopang kemampuan mengemas pengalaman, konektivitas, penyelenggaraan acara, infrastruktur, dan pelayanan. Qatar juga dinilai berhasil memanfaatkan penerbangan, infrastruktur, perhotelan, acara internasional, dan strategi pencitraan global untuk meningkatkan visibilitasnya sebagai destinasi.

Dalam forum tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah memaparkan potensi daerahnya yang mencakup kuliner, warisan budaya, pegunungan, pantai, kepulauan, serta kawasan selancar bertaraf internasional. Sumatera Barat dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungannya dengan perekonomian Samudra Hindia dan memosisikan diri sebagai destinasi internasional, bukan hanya tujuan wisata domestik.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa membawa perspektif pembangunan destinasi di provinsi baru yang memiliki kekayaan alam dan bentang alam luar biasa. Papua Tengah menghadapi tantangan membangun institusi pemerintahan, infrastruktur, konektivitas, serta sumber daya manusia hampir secara bersamaan.

Menurut James, kehadiran kedua gubernur itu menegaskan bahwa masa depan pariwisata Indonesia tidak hanya dibangun di Jakarta dan Bali, melainkan di berbagai daerah. Karena berada paling dekat dengan destinasi, persoalan lapangan, dan pelaku usaha lokal, Kadin Daerah mempunyai peran penting dalam menjembatani peluang investasi dengan kebutuhan konkret masyarakat.

Forum tersebut juga menghadirkan sejumlah pelaku usaha untuk menyampaikan masukan praktis. Pendiri Tomorrow Retail Group Kenny Koesoemo membahas perkembangan wisata perkotaan di Jakarta, terutama meningkatnya kunjungan wisatawan Asia Tenggara, khususnya dari Malaysia, untuk menikmati pusat kuliner, kawasan Blok M, pusat perbelanjaan, gaya hidup, serta perjalanan menggunakan kereta cepat Whoosh menuju Bandung.



Foto bersama usai Kadin Monthly Diplomatic Economic Breakfast bertajuk "Tourism: Indonesia's Next Growth Engine Jobs, Investment, Region and The World" di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta, Jumat (11/09/2026).

Fenomena tersebut, kata James, memperlihatkan perubahan cara wisatawan memilih destinasi. Arus wisata tidak lagi hanya digerakkan kampanye konvensional, tetapi juga oleh konten yang tersebar melalui TikTok dan Instagram. Ketika sebuah tempat, makanan, atau pengalaman menjadi viral, ribuan orang dapat terdorong untuk datang dan merasakan pengalaman serupa.

Perspektif industri perjalanan wisata internasional disampaikan Wakil ketua Umum (WKU) Bidang Pariwisata Kadin Indonesia sekaligus CEO Pacto Raty Ning. Sementara itu, perwakilan diplomatik Singapura dan Qatar diharapkan berbagi pengalaman mengenai pembangunan pariwisata di negara masing-masing.

James mengatakan, Singapura berhasil membangun salah satu ekonomi pariwisata paling maju di dunia meskipun memiliki sumber daya alam yang terbatas. Keberhasilan itu ditopang kemampuan mengemas pengalaman, konektivitas, penyelenggaraan acara, infrastruktur, dan pelayanan. Qatar juga dinilai berhasil memanfaatkan penerbangan, infrastruktur, perhotelan, acara internasional, dan strategi pencitraan global untuk meningkatkan visibilitasnya sebagai destinasi.

Dalam forum tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah memaparkan potensi daerahnya yang mencakup kuliner, warisan budaya, pegunungan, pantai, kepulauan, serta kawasan selancar bertaraf internasional. Sumatra Barat dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungannya dengan perekonomian Samudra Hindia dan memosisikan diri sebagai destinasi internasional, bukan hanya tujuan wisata domestik.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa membawa perspektif pembangunan destinasi di provinsi baru yang memiliki kekayaan alam dan bentang alam luar biasa. Papua Tengah menghadapi tantangan membangun institusi pemerintahan, infrastruktur, konektivitas, serta sumber daya manusia hampir secara bersamaan.

Menurut James, kehadiran kedua gubernur itu menegaskan bahwa masa depan pariwisata Indonesia tidak hanya dibangun di Jakarta dan Bali, melainkan di berbagai daerah. Karena berada paling dekat dengan destinasi, persoalan lapangan, dan pelaku usaha lokal, Kadin Daerah mempunyai peran penting dalam menjembatani peluang investasi dengan kebutuhan konkret masyarakat.

Pariwisata, lanjut James, mempunyai daya ungkit yang luas dan dapat langsung dirasakan masyarakat. Pembangunan hotel menciptakan pekerjaan, restoran menyerap tenaga kerja, dan pembukaan rute penerbangan baru menggerakkan transportasi serta jasa pendukung. Bahkan, secangkir kopi yang dibeli wisatawan dapat menghasilkan pendapatan bagi kedai, distributor, pengolah kopi, hingga petani.

Demikian pula, usaha wisata selam menciptakan pekerjaan bagi pemandu, awak kapal, penyedia penginapan, dan masyarakat pesisir. Ketika sebuah destinasi berkembang, peluang ikut terbuka bagi sektor transportasi, kuliner, ritel, kerajinan, hiburan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Pariwisata bukan semata-mata mengenai wisatawan. Pariwisata adalah tentang lapangan kerja, pertumbuhan daerah, devisa, kewirausahaan, dan kepercayaan diri bangsa," tegas James.

James menambahkan, Indonesia tidak kekurangan potensi pariwisata. Menurutnya, yang diperlukan adalah membuka dan mengembangkan potensi tersebut dalam skala yang lebih besar.

“Pariwisata adalah salah satu cara paling nyata untuk mengubah apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada Indonesia alam, budaya, manusia, dan keberagaman menjadi lapangan kerja, investasi, dan kemakmuran bagi rakyat,” ujarnya.

Ia berharap pertemuan yang mempertemukan pemerintah, korps diplomatik, kepala daerah, investor, pengusaha, praktisi, serta jajaran Kadin tersebut menghasilkan gagasan yang dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Seluruh masukan dalam forum itu selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk ditanggapi dan dipertimbangkan bersama jajaran kementerian.

James juga menyampaikan salam Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie yang telah berada di New Delhi untuk mengikuti rangkaian pertemuan BRICS. Sejumlah pengurus Kadin dijadwalkan menyusul ke India setelah acara tersebut.

“Kita harus lebih terencana dalam mengubah keunggulan alam dan budaya Indonesia menjadi kegiatan ekonomi. Karena itulah, Kadin meyakini pariwisata layak memperoleh tempat yang jauh lebih besar dalam strategi pertumbuhan Indonesia,” pungkas James.

Sementara itu, Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya membangun pariwisata berkualitas yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih baik, nilai ekonomi yang lebih besar, serta manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan dunia usaha.

“Bagi saya sebagai Menteri, ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk berbagi dengan Anda semua mengenai perkembangan sektor pariwisata Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto, posisi kita saat ini, apa yang sedang kita upayakan, dan peluang untuk tumbuh bersama,” kata Widiyanti.

“Saya sangat menantikan pertukaran pandangan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk berbagi cerita Indonesia, tetapi juga untuk mendengarkan, belajar, dan mengeksplorasi bagaimana kita dapat membangun kemitraan yang lebih kuat serta menciptakan nilai yang lebih besar bersama,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pariwisata Kadin Indonesia Raty Ning mengatakan Kadin menargetkan peningkatan inbound tourism atau kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama aksesibilitas dan infrastruktur.

“Target kita adalah untuk meningkatkan inbound tourism masuk ke dalam Indonesia. Dengan begitu banyak potensi inbound itu sendiri, ada catatan-catatan kami, hal-hal yang memang harus kita tingkatkan. Yang sudah baik kita tingkatkan, seperti mungkin yang paling krusial mengenai accessibility untuk masuk ke Indonesia,” kata Raty.

Raty mengatakan Indonesia telah memiliki sejumlah pintu masuk utama seperti Bali dan Jakarta. Namun, kedua wilayah tersebut dinilai sudah cukup padat sehingga diperlukan gateway baru yang dapat mewakili berbagai wilayah di Indonesia.

“Kita mesti punya gateway-gateway lagi mewakili seluruh Indonesia supaya turis itu masuk ke Indonesia itu jauh lebih mudah,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, WKU Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega, WKU Bidang Wisata Maritim Kadin Indonesia Ismail Ning, WKU Bidang Pemasaran, Promosi, Inovasi dan Pengembangan Produk UMKM Kadin Indonesia Rifda Ammarina.

Juga hadir jajaran Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi di antaranya Ketum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchary Bachter, Ketum Kadin Provinsi Jambi Usman Sulaiman, Ketum Kadin Provinsi Ritchie Glen Yapranadi, Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur Bobby Lianto, Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan Shinta Laksmi Dewi dan Ketum Kadin Provinsi Papua Jeqline Yoku.

Kadin dan Pegadaian Kolaborasi Dorong Emas Jadi Instrumen Tabungan dan Investasi



Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dan Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan mengenai kolaborasi strategis dalam memperluas pemanfaatan produk dan layanan Pegadaian di kalangan dunia usaha dan masyarakat, di Pegadaian Tower, Jakarta Pusat, Rabu (12/08/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama PT Pegadaian (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam program Pemberdayaan Ekonomi Terintegrasi bertajuk “Kolaborasi Strategis Kadin dan Pegadaian untuk MengEMASKan Indonesia” di Pegadaian Tower, Jakarta Pusat, Rabu (12/08/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat dan dunia usaha terhadap emas, baik sebagai instrumen tabungan, investasi maupun sumber pembiayaan.

Anindya atau Anin sapaan akrabnya menjelaskan, Kadin merupakan wadah dunia usaha yang tidak hanya mencakup perusahaan besar, tetapi juga pelaku usaha kecil dan menengah. Karena itu, kerja sama dengan Pegadaian dapat membuka peluang bagi anggota Kadin untuk memanfaatkan berbagai layanan berbasis emas.

“Ini bisa bekerja sama, paling sedikit dari sisi saving atau simpanan, baik untuk perusahaan maupun individu. Yang kedua, tentu ini adalah cara yang baik untuk pendanaan ke depannya,” ujar Anin.

Anin menilai emas memiliki karakteristik sebagai instrumen penyimpan nilai yang relatif stabil. Selama ini, masyarakat kerap membandingkan nilai kekayaan dalam rupiah maupun dolar AS, sementara emas dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjaga nilai aset dalam jangka panjang.

“Ini bisa bekerja sama, paling sedikit dari sisi saving atau simpanan, baik untuk perusahaan maupun individu. Yang kedua, tentu ini adalah cara yang baik untuk pendanaan ke depannya,” ujar Anin.

Anin menilai emas memiliki karakteristik sebagai instrumen penyimpan nilai yang relatif stabil. Selama ini, masyarakat kerap membandingkan nilai kekayaan dalam rupiah maupun dolar AS, sementara emas dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjaga nilai aset dalam jangka panjang.

Anin juga mengapresiasi perkembangan ekosistem emas di Indonesia, mulai dari layanan perbankan emas hingga instrumen investasi berbasis emas. Dalam kesempatan yang sama, Anin juga turut berkesempatan mencoba langsung fasilitas ATM emas Pegadaian.

“Saya tadi mencoba sendiri di ATM. Benar-benar kalau punya tabungan itu bisa menarik emasnya sendiri. Jadi masyarakat juga nyaman bahwa benar-benar emas yang ada,” kata Anin.

Anin menambahkan, salah satu fokus utama kerja sama Kadin dan Pegadaian adalah meningkatkan sosialisasi dan literasi mengenai emas sebagai instrumen tabungan masyarakat. “Kita bisa menggiatkan, menyosialisasikan emas sebagai tabungan. Bahkan tadi saya suka tagline-nya, mencapai Indonesia Emas dengan emas,” ujar Anin.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie melakukan uji coba pembelian Logam Mulia Pegadaian melalui vending machine di Pegadaian Tower, Jakarta Pusat, Rabu (12/08/2026)

Selain sebagai instrumen tabungan, Anin menilai emas juga dapat dimanfaatkan untuk investasi dan pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan sekaligus mendorong masyarakat membangun kebiasaan menabung.

"Kebutuhan kita memang besar sebagai negara. Keberhasilan Indonesia untuk keluar dari middle income trap adalah dengan menabung, dan menabung yang paling bagus adalah menabung di emas," kata Anin.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan mengatakan, MoU tersebut menjadi bentuk kolaborasi strategis antara Pegadaian dan Kadin Indonesia untuk memperluas pemanfaatan produk dan layanan Pegadaian di kalangan dunia usaha dan masyarakat.

Damar menjelaskan, salah satu produk utama Pegadaian adalah tabungan emas yang dapat diakses masyarakat secara mudah melalui aplikasi Tring by Pegadaian.

"Pegadaian mempunyai produk-produk yang menarik, yang utama adalah Tabungan Emas dengan aplikasi Tring. Semua masyarakat bisa menggunakan urusan emas dengan mudah dan cepat melalui aplikasi Tring," kata Damar.

Menurutnya, jaringan Kadin dan Pegadaian yang sama-sama tersebar di berbagai wilayah Indonesia menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi tersebut.

"Kadin ada di seluruh Indonesia, Pegadaian ada di seluruh Indonesia. Sebenarnya sangat klop sekali untuk melakukan kolaborasi," ujarnya.

Damar menambahkan, aplikasi Tring by Pegadaian dapat digunakan oleh masyarakat dari berbagai kelompok usia karena dirancang agar mudah dan sederhana. Selain layanan digital, Pegadaian juga terus mengembangkan akses transaksi emas melalui ATM emas.

Kerja sama tersebut juga mencakup pelatihan, pendampingan, serta literasi keuangan bagi anggota Kadin dan masyarakat binaannya. Selain itu, kedua pihak akan melakukan sinergi dalam mendukung realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie didampingi oleh Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan saat memberikan sambutan pada acara program Pemberdayaan Ekonomi Terintegrasi bertajuk "Kolaborasi Strategis Kadin dan Pegadaian untuk MengEMASKan Indonesia" di Pegadaian Tower, Jakarta Pusat, Rabu (12/08/2026).

"Saat ini baru ada 20 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Adapun ruang lingkup MoU antara Kadin Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) meliputi penyediaan produk dan layanan Pegadaian kepada karyawan, perusahaan, dan supplier dari perusahaan-perusahaan anggota Kadin Indonesia sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Kerja sama tersebut juga mencakup pelatihan, pendampingan, serta literasi keuangan bagi anggota Kadin dan masyarakat binaannya. Selain itu, kedua pihak akan melakukan sinergi dalam mendukung realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah (OKP) Kadin Indonesia Erwin Aksa, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia yang juga sekaligus Komisaris Independen PT Pegadaian (Persero) Kukrit Suryo Wicaksono, WKU Wilayah Jawa I (Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat) Kadin Indonesia Agung Suryamal Sutisna dan WKU Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara Kadin Indonesia Amirullah Abas.

Temui Menteri Pertanian RI, Kadin Sampaikan Empat Program Utama Satgas Protein untuk Mendukung Program MBG



Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman berfoto bersama Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Peternakan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Protein, Cecep Muhammad Wahyudin (tujuh dari kiri), dan WKU Bidang Pertanian sekaligus Wakil Ketua Hubungan Kerja Sama Internal Satgas Protein, Devi Erna Rachmawati (delapan dari kanan) beserta jajaran Pengurus Kadin Indonesia dan Kementerian Pertanian, di Kantor Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, Kamis (27/08/2026).

Jakarta – Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Peternakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Protein Cecep Muhammad Wahyudin bersama WKU Bidang Pertanian Kadin Indonesia sekaligus Wakil Ketua Hubungan Kerja Sama Internal Satgas Protein Devi Erna Rachmawati melakukan audiensi dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, Kamis (27/08/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan ekosistem penyediaan protein nasional, khususnya untuk mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Cecep mengatakan, dalam pertemuan tersebut Kadin Indonesia menyampaikan empat program utama Satgas Protein yang dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan dan rantai pasok protein dari hulu hingga hilir.

“Pertama adalah hilirisasi untuk produk-produk hasil pertanian dan peternakan yang berkaitan dengan protein. Kedua, desentralisasi ayam petelur. Ketiga, pengembangan kawasan sapi perah di Indonesia. Keempat, digitalisasi sistem dari hulu sampai dengan hilir,” ujar Cecep.

Keempat program tersebut kata Cecep diharapkan dapat membangun ekosistem protein yang lebih terintegrasi sekaligus melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.



Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman saat menerima audiensi Kadin Indonesia terkait penguatan ekosistem protein nasional untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Pertanian.



Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan Kadin Indonesia yang juga merupakan Ketua Satgas Protein saat memberikan paparan dalam audiensi bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Kantor Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, Kamis (27/08/2026).

Dalam audiensi tersebut, Kadin Indonesia juga menyampaikan sejumlah bentuk kerja sama yang dapat segera dikonkretkan bersama Kementerian Pertanian RI. Salah satunya terkait pemanfaatan alokasi 3% Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk alat dan mesin pertanian (Alsintan) bagi klaster atau ekosistem usaha yang mendukung rantai pasok protein.

"Kita mengajukan 3 persen KUR Alsintan itu untuk klasternya dimasukkan. Karena ini akan melibatkan masyarakat, itu menjadi bagian daripada satu ekosistem supply chain," jelas Cecep.

Selain itu, Kadin Indonesia mendorong percepatan pengembangan kawasan sapi perah di Indonesia. Untuk mendukung program tersebut, Kadin berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam proses importasi serta akses pembiayaan dengan skema kredit yang lebih lunak dan berjangka panjang.

"Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan sapi perah, harapannya pemerintah bisa memberikan lebih mudah lagi importasi dan juga kredit yang lunak dan panjang," kata Cecep.

Kadin Indonesia juga menilai keberadaan off-taker yang terjamin menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem protein yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Kadin berharap Kementerian Pertanian RI dapat membuka ruang kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu off-taker terbesar dalam ekosistem MBG.

"Kita ingin ada off-taker yang terjamin. Harapannya Kementan bisa membuka wacana untuk kolaborasi dengan BGN sebagai off-taker yang hari ini paling besar," ujarnya.

Lebih lanjut, Cecep menyampaikan dalam audiensi tersebut, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memberikan respons positif terhadap berbagai aspirasi dan usulan yang disampaikan Kadin Indonesia. Bahkan, menurutnya, Menteri Pertanian RI menunjukkan komitmen untuk mempercepat tindak lanjut atas sejumlah program yang dibahas.

"Respons Pak Menteri sangat baik. Alhamdulillah, di luar ekspektasi juga, Pak Menteri tampaknya ingin bergerak cepat karena memang sejalan dengan apa yang diajukan oleh kita," pungkas Cecep.

Kadin Dorong Kedaulatan AI Indonesia Melalui Penguatan Data, Infrastruktur dan Ekosistem Logistik

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Transformasi Teknologi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Digitalisasi bersama Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia /Indonesian Logistics Freight Forwarding Association dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menggelar Coffee Morning: Strategic Policy Leaders Dialog dengan tajuk “Building Indonesia’s Sovereign Artificial Intelligence Future: From Energy Infrastructure and Industrial Logistics Nodes to Economic Impact” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (02/09/2026).

Dialog ini menjadi wadah untuk membahas perkembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam mendukung transformasi industri, termasuk sektor energi dan logistik, serta melihat dampaknya terhadap perekonomian nasional

Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia Bidang Transformasi, Teknologi, UMKM, dan Digitalisasi Teguh Anantawikrama, mengatakan kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan AI. Menurutnya, AI membutuhkan data yang baik agar dapat digunakan secara efektif, baik oleh pemerintah maupun dunia usaha.

“AI ini tidak mungkin menjadi pandai kalau kita tidak feeding dengan informasi. Kita harus educate mesin kita sehingga dia menjadi efektif untuk kita sendiri,” ujar Teguh.

“Teguh menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mendorong pembahasan Undang-Undang Satu Data untuk memperkuat integrasi data antarkementerian dan lembaga. Menurutnya, integrasi tersebut diperlukan untuk memastikan data yang digunakan memiliki data integrity, data security, dan data sovereignty.

“Data integrity, data security dan data sovereignty menjadi hal yang penting,” kata Teguh.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Hilirisasi Komoditas Besi dan Baja Kadin Indonesia Akbar Djohan, mengatakan perkembangan AI dan digitalisasi perlu diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia serta konektivitas dalam ekosistem logistik. Menurutnya, sektor logistik memiliki keterkaitan yang luas sehingga transformasi teknologi harus melihat keseluruhan ekosistem, baik infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia.

“Logistik itu tidak bisa stand alone, ada ekosistemnya. Kita membahas bagaimana connectivity antara seluruh ekosistem supply chain, mulai daripada hard infrastructure dengan soft infrastructure,” ujar Akbar

Akbar menilai efisiensi menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing industri logistik nasional. Untuk itu, upaya transformasi digital perlu berjalan bersama dengan kepastian usaha dan kepastian hukum agar perkembangan teknologi dapat memberikan dampak nyata bagi dunia usaha.



Foto bersama Wakil Ketua Umum Bidang Transformasi Teknologi UMKM dan Digital Kadin Indonesia, Teguh Anantawikrama dengan para pembicara Strategic Policy Leaders Dialogue bertajuk “Building Indonesia’s Sovereign Artificial Intelligence Future: From Energy Infrastructure and Industrial Logistics Nodes to Economic Impact” yang merupakan bagian dari rangkaian acara ALFICONVEX, di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (02/09/2026).



Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Hilirisasi Komoditas Besi dan Baja Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan saat memberikan sambutan dalam acara Strategic Policy Leaders Dialogue bertajuk "Building Indonesia's Sovereign Artificial Intelligence Future: From Energy Infrastructure and Industrial Logistics Nodes to Economic Impact" yang merupakan bagian dari rangkaian ALFICONVEX di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (02/09/2026).

Ia juga menyoroti perubahan regulasi yang dinilai perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri. Menurutnya, tidak seluruh proses bisnis harus diatur secara ketat karena terdapat sektor yang dapat menerapkan mekanisme self-regulation.

"Tidak semua industri itu harus diregulatif. Tidak semua, ada self-regulatif yang disampaikan Pak Teguh tadi," kata Akbar

Ia menambahkan, harmonisasi regulasi perlu dilakukan dengan melibatkan pelaku industri agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan menghambat daya saing.

"Kami berharap, Kadin Indonesia dapat terus menyampaikan masukan dunia usaha kepada pemerintah, khususnya terkait dampak regulasi terhadap kondisi di lapangan," pungkasnya.



Wakil Ketua Umum Bidang Transformasi Teknologi UMKM dan Digital Kadin Indonesia, Teguh Anantawikrama saat memberikan sambutan dalam acara Strategic Policy Leaders Dialogue di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (02/09/2026).



Sesi diskusi strategis mengenai pengembangan Artificial Intelligence (AI) berdaulat serta penguatan infrastruktur energi dan ekosistem logistik dalam acara Strategic Policy Leaders Dialogue di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (02/09/2026).

Wajib Halal Oktober 2026, Kadin Dorong UMKM Manfaatkan Peluang Perluas Akses Pasar Global



(Dari kiri ke kanan) Global Halal Supply Chain Expert Marco Tieman, Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bekasi Wiwik Hargono, dan Board of Directors ESQ Corporation Rinaldi Agusya dalam webinar Internasional Wajib Halal Oktober 2026 bersama ESQ Halal Hub, Selasa (01/09/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama ESQ Halal Hub menggelar Webinar Internasional Wajib Halal Oktober 2026 bertajuk “Strategi Pelaku Usaha Membangun Keunggulan Bisnis Melalui Sertifikasi Halal” secara daring melalui Zoom, Selasa (01/09/2026).

Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah mengatakan kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku pada Oktober 2026 perlu dipandang bukan sekadar sebagai kewajiban regulasi, tetapi sebagai peluang strategis bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar global.

“Dengan deadline 18 Oktober 2026 yang sudah di depan mata, bagaimana para pelaku usaha, baik UMKM maupun industri, mampu melihat peluang wajib halal ini menjadi satu kekuatan ekosistem,” ujar Titi.

Titi mengatakan, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam ekosistem industri halal global. Hal tersebut didukung oleh jumlah penduduk Muslim Indonesia yang mencapai sekitar 240 juta jiwa atau 87% dari total populasi.

Namun demikian, besarnya potensi pasar domestik tersebut perlu diikuti dengan penguatan kapasitas industri dan rantai pasok halal agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi mampu menjadi produsen dan pemasok utama dalam ekosistem halal dunia.

“Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar. Tantangannya adalah bagaimana potensi yang signifikan ini mampu membawa Indonesia memimpin industri halal global,” kata Titi.



Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia, Titi Khoiriah menyampaikan pemaparan dalam sesi diskusi Webinar Internasional Wajib Halal Oktober 2026 bersama ESQ Halal Hub, Selasa (01/09/2026).

Titi menyampaikan, Indonesia saat ini berada di peringkat keempat dalam ekosistem ekonomi halal global. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat positioning di tingkat internasional. Ia menilai sertifikasi halal dapat menjadi salah satu growth engine bagi perekonomian nasional, terutama melalui penguatan rantai pasok halal (halal supply chain) dari hulu hingga hilir.

Secara global, potensi ekonomi halal saat ini telah mencapai sekitar 2,5 triliun dolar AS dan diproyeksikan terus bertumbuh. Karena itu, Titi mengingatkan agar Indonesia tidak hanya menjadikan kewajiban sertifikasi halal sebagai pemenuhan regulasi, tetapi menggunakannya sebagai competitive advantage untuk meningkatkan kualitas, kepercayaan konsumen, traceability, serta daya saing produk.



Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia, Titi Khoiriah menyampaikan pemaparan dalam sesi diskusi Webinar Internasional Wajib Halal Oktober 2026 bersama ESQ Halal Hub, Selasa (01/09/2026).

"Kalau Indonesia hanya bergantung pada kewajiban, sayang peluang itu akan menjadi market bagi negara lain. Jadi kita perlu bersama-sama melihat ini sebagai peluang," tegasnya.

Lebih lanjut, Titi menjelaskan Kadin Indonesia terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui berbagai program, termasuk pengembangan halal supply chain dan end-to-end halal value chain.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara Kadin Indonesia dengan Kadin daerah. Saat ini terdapat 38 Kadin Provinsi yang dapat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem halal nasional.

"Kami akan memperkuat rantai pasok dan membuat halal hub mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Dengan adanya halal hub bersama Kadin daerah dan para pelaku usaha, ini akan mendorong penguatan rantai pasok dan positioning Indonesia dalam ekonomi syariah dunia," jelas Titi.

Selain pengembangan halal hub, Kadin Indonesia juga menjalankan program Kadin Halal Trainer untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor halal.

Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga membangun talenta yang memahami ekosistem halal sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan skala bisnis dan memperluas pasar dari domestik menuju internasional.

"Bagaimana penguatan yang ada untuk para pelaku usaha yang tadinya baru menguasai pasar domestik, kami dorong untuk bisa juga ekspansi ke pasar global," katanya.

Kadin Indonesia lanjut Titi juga terus memperkuat kerja sama internasional melalui berbagai agenda bilateral, business matching, serta diplomasi bisnis untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok halal global.

Menurutnya, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan untuk menjadi pusat ekonomi halal dunia, mulai dari kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk Muslim yang besar, hingga potensi industri dan pasar domestik yang luas.

Lebih lanjut, Titi menekankan bahwa konsep halal saat ini telah berkembang melampaui aspek sertifikasi produk. Halal semakin berkaitan dengan kualitas, kesehatan, kebersihan, keberlanjutan, integritas, serta kepercayaan konsumen.

"Halal is lifestyle, halal is healthy, halal is hygiene, halal is sustainability. Dengan konsep halal first, Insya Allah kita bisa bersama-sama menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah," ujar Titi.

Titi mencontohkan Brasil yang menjadi salah satu eksportir ayam terbesar di dunia. Meskipun bukan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Brasil mampu memenuhi standar halal untuk memenuhi kebutuhan pasar muslim global. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi halal bukan hanya menjadi peluang bagi negara-negara mayoritas Muslim, melainkan telah berkembang menjadi pasar global yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai negara.

Karena itu, menurut Titi, Indonesia perlu memperkuat sejumlah sektor strategis dalam ekosistem halal, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, ekspor-impor, hingga keuangan syariah.

"Kita tidak hanya berbicara tentang produk yang mendapatkan sertifikasi, tetapi bagaimana kekuatan sustainability-nya, bagaimana traceability-nya, governance-nya, dan building trust-nya," katanya.

Titi juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola ekonomi halal Indonesia. Berdasarkan pemetaan yang disampaikannya, Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek halal governance yang berada di peringkat ke-16 secara global.

Menurutnya, penguatan tata kelola perlu dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, regulator, Kadin, dan pelaku usaha agar sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.



Board of Directors ESQ Corporation Ir. Rinaldi Agusyana menjadi salah satu pembicara dalam Webinar Internasional Wajib Halal Oktober 2026 bersama ESQ Halal Hub, Selasa (01/09/2026).

Proses halal yang compliance juga perlu kita dukung terkait traceability, governance, dan building trust,” ujarnya.

Titi menambahkan, kawasan Asia Pasifik memiliki porsi terbesar dalam pasar ekonomi halal global, yakni sekitar 58%, disusul Timur Tengah 20%, Eropa 15%, dan AS 5%. Besarnya potensi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang pasar yang luas bagi produk halal Indonesia.

Karena itu, Kadin Indonesia mendorong pelaku usaha untuk menjadikan momentum pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 sebagai titik awal untuk melakukan scale up bisnis.

Titi mengajak pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk tidak menunggu hingga kewajiban tersebut berlaku. Menurutnya, persiapan sertifikasi halal perlu dilakukan sejak dini agar pelaku usaha memiliki waktu untuk memperbaiki proses produksi, tata kelola, kualitas produk, serta strategi pemasaran.

“Jangan melihat halal hanya sebagai beban atau kewajiban. Jadikan halal sebagai bagian dari strategi bisnis untuk naik kelas, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen,” katanya.

Titi menegaskan, keberhasilan Indonesia dalam membangun industri halal global membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, regulator, dunia usaha, lembaga keuangan, asosiasi, serta Kadin daerah perlu bergerak bersama untuk membangun ekosistem halal yang terintegrasi.

“Dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat, kita berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi menjadi pemain utama dan pusat ekonomi halal dunia,” pungkas Titi.

Turut hadir sebagai narasumber di antaranya Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Haikal Hassan, Global Halal Supply Chain Expert Marco Tieman dan Board of Director ESQ, Rinaldi Agusyana.



Kadin Indonesia Luncurkan Nusantara Rising dan Soft Power White Paper, Ajak Sinergi Lintas Sektor Menuju Indonesia Emas 2045

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia, Shinta Widjaja Kamdani memberi sambutan di IdeaFest 2026 di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat Kamis (04/09/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi meluncurkan Nusantara Rising: Indonesia's Collective Soft Power Movement sekaligus Indonesia Soft Power White Paper, dalam rangkaian IdeaFest 2026 di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat Kamis (04/09/2026).

Inisiatif ini disusun bersama pelaku industri dan akademisi, serta mendapat dukungan Kementerian Kebudayaan RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif RI.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia Shinta Widjaja Kamdani, membuka acara dengan memaparkan skala ekonomi yang selama ini luput dari perhatian.

Shinta mencontohkan industri drama pendek Tiongkok (duanju) yang baru berjalan tiga tahun namun sudah menghasilkan sekitar Rp156 triliun per tahun, setara nilai ekspor migas Indonesia pada 2024. Ia juga menyoroti Korea Selatan, yang investasi budaya pemerintahnya sebesar 440 juta dolar AS per tahun kini menggerakkan industri konten senilai 107 miliar dolar AS.

"Indonesia tidak kekurangan bahan baku. Yang belum ada adalah rajutan yang menyatukan semuanya secara strategis, dari pendekatan sektoral menuju ekonomi budaya sirkular, ujar Shinta.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Kebudayaan Kadin Indonesia Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan bahwa kekayaan budaya Indonesia, lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa hidup, belum otomatis menjadi kekuatan. Ia menyampaikan bahwa tantangan struktural terbesar saat ini adalah the missing middle: banyak karya kreatif Indonesia terlalu besar untuk pembiayaan mikro, namun belum cukup bankable untuk pembiayaan korporasi atau modal ventura.

Rahayu menegaskan posisi Kadin Indonesia dalam ekosistem ini bersifat menjembatani, bukan menggantikan tugas kementerian.



Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya (delapan dari kanan) dan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon (tujuh dari kiri) berfoto bersama Jajaran pengurus Kadin Indonesia usai peluncuran Nusantara Rising dan Soft Power White Paper dalam rangkaian IdeaFest di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat Kamis (04/09/2026).



Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin Indonesia, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo memberikan pemaparan terkait “Budaya Bukan Hanya Warisan” di IdeaFest 2026 di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat Kamis (04/09/2026).

“Kadin Indonesia tidak hadir untuk menggantikan peran pemerintah. Kadin Indonesia hadir untuk menjembatani kebijakan dengan industri, kreator dengan pembiayaan, dan IP lokal dengan peluang global,” ujarnya.

Sebagai perintis penyusunan White Paper, Ivan Chen dari Pengurus Kadin Indonesia Bidang Kebudayaan memaparkan riset di baliknya: pelajaran dari reklasifikasi anggaran budaya Korea Selatan pascakrisis 1997, keberpihakan yang dijamin Konvensi UNESCO 2005, hingga peran negara sebagai pembuat kebijakan. Ivan juga mengaitkan urgensi ini dengan data ketenagakerjaan: mayoritas pengangguran muda Indonesia berada di rentang usia yang sama dengan populasi yang juga mendominasi 183 juta pemain gim domestik.

“Generasi muda yang tidak berakar pada budayanya sendiri tidak akan tumbuh menjadi generasi emas. Itu bukan sekadar krisis kebudayaan. Itu krisis kedaulatan,” ujarnya.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyambut baik peluncuran Nusantara Rising dan menegaskan bahwa kekayaan budaya Indonesia memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi sekaligus soft power nasional.

“Indonesia memiliki mega cultural diversity. Kekayaan budaya kita bukan hanya warisan yang perlu dilestarikan, tetapi juga sumber kreativitas, nilai ekonomi, dan daya pengaruh Indonesia di dunia,” ujar Fadli.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kebudayaan RI juga menyerahkan SK pembentukan Komite Nasional Soft Power Indonesia sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pengembangan soft power Indonesia.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, memaparkan keselarasan inisiatif ini dengan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Nasional yang telah diresmikan Presiden, dan memastikan sinergi keduanya ke depan.

Kementerian Ekonomi Kreatif RI lanjutnya, siap berkolaborasi dengan Kadin Indonesia dalam mendukung Nusantara Rising.

“Kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar bagi konten global, tetapi juga tumbuh sebagai content powerhouse yang mampu membawa budaya, karakter, dan cerita Indonesia menjadi karya kreatif anak bangsa; baik musik, film, animasi, maupun gim menuju panggung dunia,” katanya.

“Tantangan kita ke depan adalah bagaimana mengorkestrasi seluruh potensi tersebut agar tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga menjadi soft power Indonesia di tingkat global,” tambahnya.

Nusantara Rising dan Indonesia Soft Power White Paper diposisikan sebagai fondasi kolaborasi lintas hexahelix pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan mitra pembiayaan/teknologi, untuk menyatukan strategi dan program yang selama ini berjalan sektoral. Kadin Indonesia menegaskan dokumen ini bukan titik akhir, melainkan awal dari gerakan bersama menuju Indonesia Emas 2045.

Hadir dalam acara tersebut WKU Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko.

Kadin Luar Negeri

Kadin Buka Peluang Investasi Swedia di Indonesia, Fokus IEU-CEPA hingga OECD



Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Hubungan Luar Negeri, Bernardino M. Vega saat memberikan sambutan dalam acara Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) 2026 Business Dinner di Park Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026) malam.

Jakarta – Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Hubungan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bernardino M. Vega mendorong penguatan kemitraan ekonomi Indonesia dan Swedia melalui peningkatan kerja sama perdagangan, investasi, teknologi, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Bernardino atau yang akrab disapa Dino Vega dalam acara Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) 2026 Business Dinner yang berlangsung di Park Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026) malam.

Dino Vega mengatakan, hubungan Indonesia dan Swedia telah memiliki fondasi yang kuat, baik secara diplomatik maupun ekonomi. Kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1950 dan selama lebih dari tujuh dekade hubungan tersebut berkembang ke berbagai sektor, mulai dari energi, kendaraan listrik, keberlanjutan, pertambangan, kesehatan, hingga kehutanan.

"Hubungan kita memiliki kedalaman, bukan sekadar seremonial. Fondasi hubungan ekonomi kita semakin kuat, dan masih ada ruang yang besar untuk berkembang. Tantangannya adalah bagaimana kita meningkatkan kemitraan tersebut," ujar Dino Vega.

Dino Vega menambahkan, saat ini terdapat sekitar 80 perusahaan Swedia yang beroperasi di Indonesia. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut juga telah membangun ekosistem bisnis dengan mitra Indonesia, termasuk distributor, pemasok, dan penyedia jasa.

Sementara itu, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Swedia tercatat sekitar 825 juta dolar AS. Angka tersebut masih relatif kecil dibandingkan total perdagangan barang Indonesia dengan Uni Eropa yang mencapai sekitar 27 miliar dolar AS.

"Artinya, kehadiran Swedia di Indonesia sudah cukup dalam, tetapi volumenya masih memiliki ruang yang sangat besar untuk tumbuh," katanya.

Dino Vega menilai prospek tersebut semakin terbuka seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025 dan diproyeksikan berada di kisaran 5,2% pada 2026. Dengan populasi sekitar 283 juta jiwa dan posisi sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dinilai memiliki pasar yang besar dan relatif muda.

"Terlepas dari pandangan masing-masing mengenai kecepatan pertumbuhan tersebut, arah pembentukan modal di Indonesia jelas meningkat dan dilakukan secara terencana," ujar Dino Vega.

Lebih lanjut, Dino Vega menyebut terdapat dua peluang strategis yang dapat semakin memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Swedia. Salah satunya adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Menurut dia, IEU-CEPA akan menjadi perubahan struktural penting bagi pasar Indonesia-Eropa. Perjanjian tersebut mencakup penghapusan sekitar 98,5% tarif Indonesia terhadap barang-barang dari Uni Eropa, pembukaan akses jasa di bidang komputer dan telekomunikasi, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual.



Penandatanganan MoU antara Midsummer dan PT Metalogika mengenai kerja sama di sektor energi terbarukan yang disaksikan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia, M. Azis Syamsuddin (lima dari kiri) dan Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bernardino M. Vega (tiga dari kanan) di Park Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

"Ini merupakan perubahan struktural terbesar di pasar dalam satu dekade terakhir dan implementasinya semakin dekat," katanya.

Dino Vega menegaskan, survei menunjukkan 66% perusahaan Swedia di Indonesia memperkirakan CEPA akan meningkatkan prospek bisnis mereka. Sementara itu, 54% perusahaan berharap adanya penurunan bea masuk untuk bahan baku dan produk jadi dari Uni Eropa.

Peluang strategis kedua adalah proses akses Indonesia menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dino Vega mengatakan Swedia memiliki pengalaman dan keahlian yang dapat membantu Indonesia dalam memenuhi berbagai standar OECD.

Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang mengajukan keanggotaan OECD. Proses teknis komprehensif telah dimulai pada Juli 2026, dengan 26 komite teknis melakukan penilaian terhadap Indonesia berdasarkan standar OECD di berbagai bidang kebijakan publik, termasuk perdagangan, investasi, tata kelola, persaingan usaha, serta integritas.

"Kadin memandang akses OECD sebagai sebuah proyek bisnis, bukan hanya proyek diplomatik," ujar Dino Vega.

Ia menambahkan, Kadin Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI telah meluncurkan OECD Private Sector Playbook pada April 2026 sebagai panduan bagi sektor swasta dalam mendukung proses akses Indonesia.

Dalam konteks tersebut, Dino Vega mengajak perusahaan, organisasi bisnis, dan regulator Swedia untuk membangun kerja sama dengan Kadin Indonesia, khususnya melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam regulatory impact assessment, kebijakan persaingan usaha, integritas, serta kepatuhan antikorupsi.

"Swedia mengetahui apa yang diperlukan untuk memenuhi standar OECD karena Swedia turut berkontribusi dalam pembentukan standar tersebut. Kami mengundang dunia usaha, organisasi bisnis, dan regulator Swedia untuk bekerja sama dengan Kadin melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang terstruktur," katanya

Menurut Dino Vega, dukungan Swedia terhadap proses akses OECD juga pada akhirnya akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih mudah bagi perusahaan Swedia untuk beroperasi di Indonesia.

Dino Vega juga menekankan pentingnya mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan. Menurutnya, daya saing Indonesia ke depan akan semakin ditentukan oleh kemampuan dunia usaha dalam memenuhi standar lingkungan global.

Di sektor energi, misalnya, Kadin Indonesia bersama BloombergNEF telah memperkirakan kebutuhan investasi sekitar 3,5 triliun dolar AS untuk mencapai target net zero Indonesia pada 2050.

Sementara bagi eksportir Indonesia ke Eropa, kemampuan mengurangi intensitas karbon akan semakin penting untuk mempertahankan akses pasar. Dalam hal ini, teknologi Swedia dinilai dapat membantu perusahaan Indonesia tidak hanya memenuhi standar kepatuhan, tetapi juga meningkatkan daya saing.



Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono memberi sambutan dalam acara Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) 2026 Business Dinner yang berlangsung di Park Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026) malam.

"Teknologi Swedia tidak hanya dapat membantu memenuhi standar kepatuhan, tetapi juga menjaga daya saing perusahaan dan memastikan akses pasar tetap terbuka," ujar Dino Vega.

Kerja sama juga dinilai terbuka di sektor kendaraan listrik, pertambangan, kesehatan, pangan, dan kehutanan. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan rantai pasok mineral berkelanjutan menjadi salah satu bidang yang dapat mempertemukan keunggulan sumber daya Indonesia dengan teknologi dan standar Eropa.

Di sektor kesehatan, Indonesia memiliki agenda transformasi, termasuk target melakukan sequencing terhadap 400.000 genom (gen dan kromosom) hingga 2030. Sementara program Makan Bergizi Gratis membuka peluang pengembangan rantai dingin, pengemasan, dan berbagai industri pendukung dalam skala besar. Adapun di sektor kehutanan, Bernardino menyambut baik inisiatif kerja sama yang mempertemukan kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan pengalaman Swedia dalam pengelolaan kehutanan berkelanjutan.

Dino Vega menegaskan bahwa Indonesia dan Swedia memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Indonesia memiliki skala pasar, sumber daya, demografi, dan ekonomi yang terus berkembang, sementara Swedia memiliki standar, teknologi, dan kredibilitas kelembagaan.

"Tidak satu pun dari kita akan memperoleh hasil maksimal jika berjalan sendiri. Kita harus melakukannya bersama dan melalui kolaborasi," ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, WKU Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Erna Rachmawati, WKU Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Pembangunan Pedesaan serta Transmigrasi Kadin Indonesia Thomas Djusman serta WKU Bidang Riset dan Teknologi Kadin Indonesia Ilham Akbar Habibie.

KBRI Bern Dukung Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Komoditas Global antara Kadin Indonesia dan Suissenegoce Swiss



Penandatanganan Kerja Sama pendidikan dan pelatihan perdagangan komoditas global oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (Tengah) dan Sekretaris Jenderal Suissenegoce, Florence Schurch (Kanan), yang disaksikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Swis I Gede Ngurah Swajaya (kiri) dan Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia-Swis, Francis Wanandi di Jenewa, Swiss, Kamis (20/8/2026).

Jenewa – Perayaan 75 Tahun peringatan hubungan bilateral Indonesia – Swis semakin bermakna dengan kerja sama kemitraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang perdagangan komoditas global antara Kadin Indonesia dan Suissenegoce.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bern mendukung penuh kemitraan ini sebagai bentuk tindak lanjut kunjungan Guy Parmelin, Menteri Federal Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Riset Swis, ke Jakarta bulan Oktober 2025, dan penandatanganan kerja sama pengolahan mineral dan metal Indonesia-Swis yang dilakukan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, dengan Menteri Federal Bidang Ekonomi, Pendidikan dan Riset Swis, Guy Parmelin, bulan Juni 2026.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan Sekretaris Jenderal Suissenegoce, Florence Schurch, yang disaksikan Duta Besar Ngurah Swajaya dan Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia-Swis, Francis Wanandi.

Suissenegoce adalah asosiasi perdagangan komoditas Swis, menaungi sekitar 215 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang untuk menunjang kegiatan perdagangan komoditas global. Anggota Suissenegoce bergerak di tiga sektor utama, yakni pertanian (sereal, kopi, minyak sawit, kakao dan kapas), mineral dan logam (logam besi dan non besi), dan energi (bahan bakar fosil, energi terbarukan, dan transisi energi).

Melalui perjanjian kemitraan ini, akan segera dilakukan pelatihan dan pendidikan bersertifikasi Suissenegoce mengenai global commodities trading. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan pendapatan dalam kegiatan perdagangan komoditas global, khususnya komoditas unggulan ekspor.

Swis merupakan salah satu hub terbesar commodity trading dunia yang memiliki pengalaman dan jaringan serta sumber daya manusia yang unggul dalam perdagangan komoditas global. Posisi Swis sebagai global trading hub dimulai dari sejak era perang dingin sekitar tahun 1950an, dan menguasai sepertiga atau lebih dari pangsa pasar perdagangan komoditas global. Dimulai dari perdagangan sereal lalu kapas hingga berkembang ke berbagai perdagangan komoditas seperti minyak mentah, batubara, bijih besi, tembaga serta kopi dan kakao.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (kiri) berbincang dengan Sekretaris Jenderal Suissenegoce, Florence Schurch (kanan) usai penandatanganan kerja sama antara Kadin Indonesia dan Suissenegoce di Jenewa, Swis tanggal (20/8/2026).

Sebagai negara yang miskin sumber daya alam, Swis berperan sebagai pihak ketiga yang membeli komoditas dari negara pengekspor untuk dijual secara langsung ke negara ketiga lainnya, sehingga komoditas yang diperdagangkan tidak masuk ke pasar domestik Swis.

Kekuatan Swis sebagai pusat perdagangan komoditas dunia merupakan hasil dukungan dari lembaga perbankan dan perpajakan Swis yang menciptakan sistem layanan pembiayaan jangka pendek serta sistem perpajakan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan melakukan perdagangan komoditas.

"KBRI Bern telah lama menjajaki upaya kemitraan Suissenegoce dengan Kadin Indonesia dan penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah awal dan konkrit yang dimulai bertepatan dengan perayaan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Swis", ujar Dubes Ngurah Swajaya.

"Pengembangan SDM mengenai perdagangan komoditas global merupakan langkah konkrit agar Indonesia tidak hanya menjadi negara produsen tapi juga bisa menjadi pemain yang berpengaruh di pasar perdagangan komoditas dunia" ujar Ketum Kadin di sela-sela penandatanganan perjanjian yang dilakukan di Jenewa, Swis tanggal 20 Agustus 2026.

Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia-Swis, Francis Wanandi menjelaskan program pendidikan bersertifikasi yang berdurasi 5 minggu akan segera dilakukan secara reguler di Jakarta yang akan melibatkan berbagai pelaku bisnis perdagangan global swasta dan BUMN.

Kadin Indonesia melihat peranan penting Suissenegoce dalam membangun kapasitas dan membangun jejaring di bidang perdagangan komoditas dunia, utamanya melalui berbagai pelatihan khusus yang dilakukan oleh para praktisi berpengalaman yang terkait langsung dalam perdagangan komoditas, sehingga banyak diminati oleh berbagai perusahaan perdagangan komoditas dari berbagai negara.

Melalui kemitraan ini, Kadin Indonesia sebagai organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian berharap dapat berperan secara aktif dan mendorong berbagai perusahaan anggotanya untuk turut mendukung pemajuan perdagangan komoditas serta membangun ekosistem pendukung di Indonesia.



Wakil Ketua Umum Bidang Diplomasi Multilateral Kadin Indonesia, Andi Anzhar Cakra Wijaya (lima dari kanan) berfoto bersama dengan jajaran perwakilan negara-negara ASEAN Timur usai acara serah terima tuan rumah BIMP-EAGA Trade, Investment and Halal Industry tahun berikutnya, di Kota Kinabalu, Malaysia, Rabu (02/09/2026).

Kadin Indonesia Terima Estafet Tuan Rumah BIMP-EAGA Trade, Investment and Halal Industry Conference 2027

Kota Kinabalu, Malaysia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menerima penyerahan simbolis status tuan rumah BIMP-EAGA Trade, Investment and Halal Industry Conference dari Malaysia kepada Indonesia. Penyerahan tersebut berlangsung dalam rangkaian 3rd BIMP-EAGA Trade, Investment and Halal Industry Conference bertema “Connecting Markets, Scaling Values” di Sabah International Convention Centre (SICC), Kota Kinabalu, Malaysia, Rabu (02/09/2026).

Dalam seremoni symbolic host handover tersebut, Kadin Indonesia diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Diplomasi Multilateral Kadin Indonesia, Andi Anzhar Cakra Wijaya. Indonesia selanjutnya akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan 4th BIMP-EAGA Trade, Investment and Halal Industry Conference di Jakarta pada Oktober 2027.

Penyerahan status tuan rumah tersebut menandai komitmen Kadin Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dunia usaha di kawasan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), khususnya dalam pengembangan perdagangan, investasi, industri halal, serta konektivitas ekonomi antardaerah.

Dalam konferensi tersebut, Ketua Komite Tetap ASEAN, BIMP-EAGA, dan IMT-GT Kadin Indonesia Soeryo Poetranto juga menjadi moderator pada sesi panel kedua bertajuk “Opportunities and Incentives for Halal Trade and Investment in BIMP-EAGA”.

Sesi tersebut menghadirkan panelis yang mewakili Wardah Malaysia, PDS Abattoir Sdn. Bhd., Philippine Trade and Investment Center, dan POIC Sabah. Diskusi membahas berbagai peluang dan insentif untuk meningkatkan perdagangan serta investasi pada sektor industri halal di kawasan BIMP-EAGA.

Soeryo mengatakan kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama karena didukung oleh kedekatan geografis, kesamaan karakteristik pasar, serta pertumbuhan permintaan terhadap produk dan layanan halal.

“BIMP-EAGA memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama dalam memperkuat perjanjian pengakuan timbal balik yang kita butuhkan di antara negara-negara BIMP-EAGA terkait produk halal,” ujar Soeryo.

Menurutnya, penguatan mutual recognition arrangement atau perjanjian pengakuan timbal balik terkait sertifikasi dan standar halal menjadi salah satu langkah penting untuk memperlancar arus perdagangan di kawasan. Harmonisasi dan pengakuan standar diharapkan dapat mengurangi hambatan perdagangan sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang ingin memperluas pasar ke negara-negara anggota BIMP-EAGA.



Wakil Ketua Umum Bidang Diplomasi Multilateral Kadin Indonesia, Andi Anzhar Cakra Wijaya (kanan) menerima penyerahan simbolis status tuan rumah BIMP-EAGA Trade, Investment and Halal Industry Conference dari Chairman Malaysian International Chamber of Commerce & Industry (MICCI) Sabah, Datuk Susan Chang (kiri), di Sabah International Convention Centre (SICC), Kota Kinabalu, Malaysia, Rabu (02/09/2026)

Kerja sama tersebut juga berpotensi membuka lebih banyak kesempatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk masuk ke dalam rantai pasok industri halal regional. Selain produk makanan dan minuman, potensi industri halal turut mencakup sektor kosmetik, farmasi, pariwisata, logistik, serta berbagai layanan pendukung lainnya.

BIMP-EAGA merupakan inisiatif kerja sama ekonomi subregional yang beranggotakan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Inisiatif tersebut didirikan di Davao City, Filipina, pada 1994 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, konektivitas, perdagangan, investasi, dan pembangunan di berbagai subwilayah negara anggotanya.

Bagi Indonesia, BIMP-EAGA mencakup sejumlah provinsi di kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kerja sama ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih merata di luar pusat-pusat ekonomi utama.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah konferensi keempat pada 2027 diharapkan menjadi momentum untuk memperluas kerja sama konkret antar-pelaku usaha, meningkatkan perdagangan dan investasi lintas batas, serta memperkuat posisi BIMP-EAGA sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri halal di Asia Tenggara.

Hadir mewakili Kadin Indonesia dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Diplomasi Multilateral Andi Anzhar Cakra Wijaya; Ketua Komite Tetap ASEAN, BIMP-EAGA, dan IMT-GT Soeryo Poetranto; Ketua Satgas Gotong Royong Makan Bergizi Gratis Chandra Tirta Wijaya; Wakil Ketua Komite Tetap Penguatan Antarlembaga BIMP-EAGA dan IMT-GT Ira Herawati Kusumawardani; Wakil Ketua Komite Tetap BIMP-EAGA Yahya Adi Dharma Prawiro; Wakil Ketua Bidang Logistik Pertanian Rian Suarianto; Wakil Ketua Komite Tetap Penguatan IMT-GT Ika Sarawati Sulandjari; Wakil Ketua Komite Tetap BIMP-EAGA Business Council Sayid Irwan; serta Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Pameran Don Haidy Abel.

Kadin Indonesia Dorong Integrasi Ekonomi Borneo melalui Konektivitas, Investasi, dan Keberlanjutan



Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia sekaligus Alternate Chairman ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), Bernardino M. Vega (lima dari kanan) berfoto bersama dengan para perwakilan negara-negara yang tergabung dalam Borneo Economic Community (BEC) Meeting di sela-sela BEC Business Roundtable di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Jumat (04/09/2026).

Kota Kinabalu, Malaysia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong penguatan integrasi ekonomi di Pulau Borneo melalui peningkatan konektivitas, perluasan investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam The 4th Borneo Economic Community (BEC) Meeting – BEC Business Roundtable yang mengusung tema “Advancing Connectivity, Investment, and Sustainability in Borneo” di Sabah International Convention Centre (SICC), Kota Kinabalu, Malaysia pada Jumat 4 September 2026.

Pertemuan strategis ini mempertemukan perwakilan dunia usaha dari Indonesia, Brunei Darussalam, serta Malaysia yang mencakup wilayah Sabah, Sarawak, dan Labuan. Forum tersebut bertujuan untuk membahas peluang kerja sama komersial lintas batas sekaligus memperkuat Borneo Economic Community (BEC) sebagai platform kolaborasi sektor swasta utama di Pulau Borneo.

Delegasi Kadin Indonesia dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia sekaligus Alternate Chairman ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Bernardino M Vega, yang menyampaikan paparan bertajuk “Building an Integrated Connectivity Vision for Borneo”.

Dalam paparannya, Dino Vega sapaan akrabnya menyampaikan visi konektivitas Borneo yang terencana secara bertahap, mencakup penguatan konektivitas udara dalam jangka pendek, pengembangan konektivitas maritim serta integrasinya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam jangka menengah, dan pengembangan jaringan kereta cepat dalam jangka panjang.

“Konektivitas menjadi fondasi untuk membangun Borneo sebagai satu ruang ekonomi yang semakin terintegrasi. Kita perlu menghubungkan bukan hanya orang dan barang, tetapi juga investasi, industri, energi, dan berbagai pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Borneo,” ujar Dino Vega.

Menurutnya, pembangunan konektivitas Borneo perlu dilakukan melalui pendekatan multimoda yang mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah. Konektivitas udara dapat menjadi salah satu langkah awal untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan pelaku usaha, sementara konektivitas laut dan darat diperlukan untuk memperkuat pergerakan barang, rantai pasok, serta perdagangan lintas batas.



Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia, Bernardino M. Vega (kanan), Managing Director Adinin Group of Companies Brunei, Haji Musa bin Haji Adnin (kiri) dan Chairman Malaysian International Chamber of Commerce & Industry (MICCI) Sabah, Datuk Susan Chang (tengah) berfoto bersama dalam The 4th Borneo Economic Community (BEC) Meeting, di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada (4/9/2026).

Dalam konteks tersebut, pembangunan IKN juga dinilai dapat menjadi salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas bagi kawasan. Pengembangan pusat ekonomi baru di Kalimantan berpotensi membuka peluang bagi peningkatan perdagangan, investasi, serta pengembangan rantai nilai lintas batas dengan Sabah, Sarawak, Labuan, dan Brunei Darussalam.

Sebagai pulau terbesar di Asia yang dihuni sekitar 24 juta jiwa, Borneo sendiri memiliki potensi ekonomi yang sangat signifikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan mencapai 165 miliar dolar AS. Momentum investasi di kawasan ini terus berkembang pesat, terlihat dari realisasi investasi Indonesia yang mencapai 107,1 miliar dolar AS pada 2025 serta investasi disetujui Malaysia sebesar 104,2 miliar dolar AS di periode yang sama. Investasi di IKN sendiri telah menembus angka 4 miliar dolar AS hingga Mei 2026 melalui puluhan kerja sama dengan pelaku usaha.

BEC Business Roundtable turut membahas tiga prioritas utama kerja sama ekonomi, yakni konektivitas, investasi, dan keberlanjutan. Setiap wilayah menyampaikan perspektif mengenai perannya dalam membangun ekosistem ekonomi Borneo yang semakin terhubung.

Sabah membahas potensi penguatan konektivitas udara dan maritim serta pengembangan koridor ekonomi Borneo bagian timur. Pembahasan tersebut mencakup optimalisasi pelabuhan, pengembangan jalur pelayaran, peningkatan konektivitas penerbangan, serta penguatan simpul strategis seperti Tawau untuk mendukung hubungan ekonomi dengan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Sementara itu, Labuan diarahkan untuk memperkuat perannya sebagai pintu gerbang maritim dan keuangan regional melalui pemanfaatan infrastruktur pelabuhan, layanan keuangan, pembiayaan lintas batas, serta mobilisasi modal bagi berbagai proyek di kawasan Borneo.

Brunei Darussalam juga memiliki peran strategis dalam mendorong investasi regional dengan memanfaatkan sumber daya modal, aset energi, serta agenda diversifikasi ekonominya. Potensi kerja sama mencakup investasi pada infrastruktur regional, ketahanan energi dan transisi energi bersih, ekonomi halal, pariwisata berkelanjutan, serta pengembangan industri nonmigas.

Bagi Indonesia, pembangunan IKN dan basis sumber daya yang dimiliki Kalimantan dinilai dapat mendorong pengembangan industri hilir dan rantai nilai regional yang lebih bernilai tambah. Peluang kerja sama antara lain mencakup pengolahan mineral bernilai tinggi, green refining, pertanian, energi terbarukan, serta pengembangan kawasan industri yang terhubung dengan Sabah, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Kerja sama tersebut juga dapat diperkuat melalui ASEAN Alliance on Carbon Markets untuk mendorong pengembangan pasar karbon yang saling terhubung, memobilisasi investasi hijau, serta mendukung pengembangan industri rendah karbon dan rantai nilai lintas batas di seluruh Borneo.



Penandatanganan Joint Statement oleh Managing Director Adinin Group of Companies Brunei Haji Musa bin Haji Adnin (kiri), Chairman Malaysian International Chamber of Commerce & Industry (MICCI) Datuk Susan Chang (tengah), dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia, Bernardino M. Vega dalam acara The 4th Borneo Economic Community (BEC) Meeting, di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada (4/9/2026).

Dino Vega mengatakan pengembangan ekonomi Borneo perlu diarahkan pada proyek-proyek konkret yang memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat di kawasan.

“Yang dibutuhkan selanjutnya adalah menerjemahkan visi bersama ini menjadi proyek yang dapat dijalankan. Kita perlu mengidentifikasi jalur konektivitas prioritas, peluang investasi yang bankable, serta sektor-sektor yang dapat membangun rantai nilai bersama sehingga pertumbuhan Borneo dapat dirasakan secara lebih luas,” ujar Dino Vega.

Brunei Darussalam juga memegang peran strategis dalam memobilisasi modal dan aset energi untuk mendukung transisi energi bersih, ekonomi halal, pariwisata berkelanjutan, serta diversifikasi industri nonmigas. Managing Director Adinin Group of Companies Brunei, Haji Musa bin Haji Adnin, menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya menghubungkan antarpulau, termasuk membuka penerbangan langsung dari Sulawesi ke Brunei guna melengkapi kerangka kerja sama kawasan yang sudah ada.

Dukungan terhadap pentingnya konektivitas juga disampaikan oleh Chairman Malaysian International Chamber of Commerce & Industry (MICCI) Sabah, Datuk Susan Chang, yang menegaskan bahwa konektivitas merupakan infrastruktur paling krusial bagi keberlangsungan BEC.

Senada dengan hal tersebut, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Noorman Effendi, menyatakan bahwa BEC dapat menjadi pelengkap yang kuat bagi BIMP-EAGA karena memberikan ruang lebih besar bagi sektor swasta. Ia menekankan pentingnya mendorong proyek-proyek quick wins yang realistis dan memiliki nilai ekonomi tinggi agar integrasi ekonomi Borneo dapat segera terwujud secara nyata.

Datuk Hajah Rosmawati dari Sabah International Expo 2026 dan Daniel Doughty dari Labuan Chamber of Commerce menekankan pentingnya sinergi kawasan dan peran Borneo Economic Community (BEC) sebagai wadah tunggal untuk mengatasi tantangan konektivitas serta isu lingkungan di Borneo. Keduanya menyoroti perlunya kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei untuk menarik investasi global, mengawal proyek strategis seperti kereta api lintas Borneo, serta mengubah tantangan ekologis menjadi peluang bisnis berkelanjutan seperti kredit karbon. Senada dengan hal tersebut, Azhar Othman dari BEBC Labuan menambahkan bahwa BEC dapat melayani kebutuhan dunia usaha secara lebih fleksibel dan efektif dibanding birokrasi resmi, terutama dalam menyuarkan aspirasi teknis kepabeanaan dan regulasi di tingkat nasional.

Dari sisi operasional dan efisiensi rantai pasok, Simon Wong dari Harrisons Sabah Sdn Bhd serta Albert Wen Yau Hwong dari Dynamik Technologies mendorong penguatan integrasi ekonomi internal tanpa sekat persaingan antardaerah. Simon mengusulkan Tawau sebagai gerbang logistik baru bagi Kalimantan Utara sembari mengimbuai para pelaku usaha untuk mengkonsolidasikan sumber daya kawasan. Mendukung kelancaran bisnis lintas batas tersebut, Albert mengajukan inisiatif “Borneo on the Go”—sistem digital yang ditargetkan beroperasi pada November 2026 untuk menyelaraskan indikator bisnis, pengakuan sertifikasi, dan mobilitas tenaga kerja profesional melalui credential wallet dalam ekosistem BEC.

Pada akhir pertemuan, para peserta menegaskan komitmen untuk memperkuat konektivitas, perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi di kawasan Borneo melalui adopsi Joint Statement sebagai landasan untuk melanjutkan kolaborasi lintas sektor swasta di kawasan Borneo. Komitmen tersebut dituangkan dalam Joint Statement of the 4th Borneo Economic Community (BEC) Business Roundtable Meeting yang diadopsi di Kota Kinabalu, Sabah, pada 4 September 2026. Pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh Haji Musa bin Haji Adnin mewakili Brunei Darussalam, Bernardino M. Vega mewakili Indonesia, serta Datuk Susan Chang Huan Soon mewakili Sabah, Malaysia. Ketiganya menyepakati penguatan BEC sebagai wadah kolaborasi sektor swasta untuk mendorong konektivitas, perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi yang lebih erat di seluruh Borneo. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan networking dinner yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia.

Secara kelembagaan, Borneo Economic Community dibentuk pada 5 September 2023 oleh anggota ASEAN-BAC bersama kamar dagang dan asosiasi bisnis se-Borneo untuk memperkuat kerangka kerja sama BIMP-EAGA. Selain berfokus pada integrasi internal pulau, BEC juga berkomitmen memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan 4th BIMP-EAGA Trade, Investment and Halal Industry Conference yang akan digelar di Jakarta pada Oktober 2027 mendatang.

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran perwakilan penting dari berbagai instansi dan dunia usaha kawasan, di antaranya Bernardino M. Vega, Haji Musa bin Haji Adnin, Datuk Susan Chang, Noorman Effendi, Hajah Rosmawati dari Sabah International Expo 2026, perwakilan Labuan Chamber of Commerce Erich Nicholas dan Daniel Doughty, perwakilan MICCI Sabah Matthew Loh dan Stella Liew, Simon Wong dari Harrisons Sabah, Datuk Jade Koh dari Jetsin, Fitriani Kuroda dari PT MilangKori Persada, Albert Wen Yau Hwong dari Dynamik Technologies, Ary Adiati perwakilan dari KJRI Kinabalu, serta delegasi Kadin Indonesia, yaitu : Ira Kusumawardani dan Rian Suarianto dari IraRian Modest Halal Fashion, Ika Saraswati Sulandjari, Yahya Adi Dharma Prawiro, Hanadia Pasca Yurista, dan Fairuz Andra Prastyanti. Melalui penguatan kolaborasi ini, Borneo diharapkan mampu berkembang menjadi ruang ekonomi terintegrasi yang memberi manfaat berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di kawasan tersebut.

Kabar Daerah

Kadin Manggarai Timur Dilantik, Perkuat Peran Dunia Usaha dalam Pemulihan Pascagempa



Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Bobby Lianto berfoto bersama dengan jajaran Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Manggarai Timur periode 2026-2031 yang telah dilantik secara resmi di Aula Rumah Jabatan Bupati Manggarai Timur, Selasa (08/09/2026).

Borong – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Manggarai Timur periode 2026–2031 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Bupati Manggarai Timur, Selasa (08/09/2026) pukul 19.00 WITA. Maximilian Firman Demorin kembali dipercaya memimpin Kadin Kabupaten Manggarai Timur untuk periode kedua.

Pelantikan tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Manggarai Timur Andreas Agas beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Bobby Lianto dan turut dihadiri sejumlah pengurus Kadin NTT, di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Ekonomi Christopher Samara dan Dewan Pakar Kadin NTT Stefanus Tani Temu.

Hadir pula Ketua Kadin Kabupaten Ende Haji Herry Jufray dan Ketua Kadin Kabupaten Nagekeo Sambu Aurelius.

Dalam sambutannya, Bobby Lianto menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada Kadin Kabupaten Manggarai Timur yang dinilai cepat merespons bencana gempa bumi yang melanda Flores.

Menurutnya, pada hari kedua setelah gempa, Kadin Kabupaten Manggarai Timur langsung turun ke lapangan untuk melakukan aksi sosial dengan menyalurkan bantuan sembako serta mengerahkan tenaga kesehatan guna membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Respons cepat yang dilakukan Kadin Manggarai Timur menunjukkan bahwa dunia usaha tidak hanya berperan dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat ketika terjadi bencana,” ujar Bobby.

Usai pelantikan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa melalui Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Flores di Kabupaten Manggarai Timur.

Bobby Lianto menegaskan, Kadin Indonesia melalui Kadin bersama Kadin kabupaten/kota se-Flores berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam penanganan dampak bencana sejak gempa pertama terjadi.

Tercatat, tujuh Kadin daerah di wilayah Flores telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak, mulai dari bahan makanan seperti beras dan sembako, terpal dan selimut, hingga material bangunan untuk mendukung kebutuhan pemulihan masyarakat.

“Ini merupakan bentuk nyata komitmen Kadin untuk hadir dan bergotong royong bersama pemerintah serta masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat dan proses pemulihan pascabencana,” kata Bobby.

Dalam penyaluran bantuan tersebut, Kadin juga berkolaborasi dengan Yayasan Peduli Flores, Persekutuan Doa Zurich, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, serta Washeng Travel & Cargo.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat distribusi bantuan sekaligus mempercepat proses pemulihan masyarakat terdampak bencana di Pulau Flores.

Dengan kembali dipercayanya Maximilian Firman Demorin untuk memimpin Kadin Kabupaten Manggarai Timur, Kadin diharapkan semakin memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan kemanusiaan di wilayah Manggarai Timur.



Kadin Sumut Buka Peluang Kerja Sama Lima Sektor dengan Victoria

Penyerahan Plakat dari Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatra Utara, Firsal Dida Mutyara kepada perwakilan Victorian Chamber of Commerce and Industry di sela-sela acara International Indonesia-Victoria Regional Business Matching Forum di Bendigo, Victoria, Australia, Rabu (16/09/2026).

Victoria, Australia – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Firsal Dida Mutyara mengatakan Sumut memiliki posisi strategis untuk menjadi mitra dalam pengembangan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Negara Bagian Victoria.

Hal tersebut disampaikan Dida saat menjadi pembicara dalam International Indonesia-Victoria Regional Business Matching Forum bertajuk “Partners in Growth, Five Sectors Trade in Both Direction – What Indonesia is Buying, What It Can Supply, and the Provincial Counterpart on the Other Side” di Bendigo, Victoria, Australia, Rabu (16/09/2026).

Dalam forum tersebut, Dida mengatakan terdapat sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan dalam kerja sama antara Sumut dan Victoria. Lima sektor tersebut meliputi industri pangan dan pertanian, energi terbarukan, pendidikan dan pelatihan vokasi, pariwisata, serta teknologi informasi.

“Indonesia dan Australia, khususnya Victoria, memiliki komplementaritas ekonomi yang tinggi. Sumatra Utara tidak hanya siap menyuplai komoditas unggulan dan produk manufaktur ke pasar Australia, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk produk, teknologi dan investasi dari Victoria ke wilayah Indonesia Barat,” kata Dida.

Dalam paparannya, Dida juga menguraikan kebutuhan impor Indonesia serta potensi komoditas dan produk Sumut yang dapat dikembangkan untuk pasar Australia.

Pendekatan melalui lima sektor tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat membangun hubungan perdagangan yang seimbang dan saling menguntungkan, sekaligus memperkuat sektor industri di daerah.

Dida berharap rangkaian pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama konkret antara dunia usaha Sumut dan Victoria.

“Kami berharap dialog dan peninjauan yang dilakukan dapat ditindaklanjuti menjadi transaksi serta kemitraan usaha jangka panjang yang memberikan manfaat bagi kedua daerah,” pungkasnya.



Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatra Utara, Firsal Dida Mutyara menjadi pembicara dalam International Indonesia-Victoria Regional Business Matching Forum di Bendigo, Victoria, Australia, Rabu (16/09/2026)

Gandeng Platform Alibaba, Kadin Jatim Buka Akses UMKM Jatim Tembus Pasar Global



Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto pada saat memberikan sambutan dalam kegiatan Workshop bertema "Bring East Java Products to 200 Countries Worldwide" di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (2/9/2026).

Surabaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Kadin Kota Surabaya menggandeng salah satu platform e-commerce, Alibaba, untuk memberikan edukasi ekspor sekaligus membantu pelaku usaha memperkenalkan produknya ke pasar global melalui platform digital dalam kegiatan workshop dengan tema "Bring East Java Products to 200 Countries Worldwide" di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (2/9/2026) petang.

Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto menegaskan, ini adalah kesempatan bagi UMKM untuk belajar bagaimana menembus pasar global. "Ini kan sudah go global, tentunya UMKM harus belajar, kualitas di global seperti apa. Dan Alibaba ini ada edukasi terkait kualitas serta kepastian jumlah barang," kata Adik.

Nantinya, seluruh produk UMKM yang hadir akan dikurasi oleh Kadin terlebih dahulu dan selanjutnya oleh Alibaba. "Target Kadin, ada sekitar 100 UMKM yang on boarding di platform Alibaba selama satu tahun atau sekitar 8-10 UMKM dalam satu bulan," ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa, juga menyambut positif kehadiran Alibaba. Ia mendorong pelaku UMKM Jatim memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar, bukan hanya mengandalkan konsumen lokal.

Menurut Endy saat ini sudah banyak pelaku UMKM asal Jawa Timur yang telah mampu mengembangkan bisnisnya ke sejumlah negara. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa produk lokal memiliki peluang untuk bersaing apabila pelaku usaha mau memanfaatkan akses dan pendampingan yang tersedia.

"Kalau memungkinkan, jangan hanya menjadi pemain di pasar Surabaya atau Jawa Timur. Manfaatkan platform ini seperti yang sudah dilakukan teman-teman yang berhasil masuk ke pasar luar negeri," kata Endy.

Endy menambahkan, UMKM merupakan salah satu penopang penting perekonomian Jawa Timur, kontribusinya mencapai sekitar 60 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pembukaan akses pasar, termasuk melalui berbagai misi dagang antardaerah maupun kerja sama dengan platform perdagangan global.

Ia berharap kolaborasi dengan Alibaba dapat menjadi tambahan pilihan bagi pelaku UMKM Jatim untuk memperluas jaringan pembeli. Dengan semakin terbukanya akses digital, produk lokal diharapkan tidak berhenti beredar di pasar domestik, tetapi mampu masuk ke rantai perdagangan internasional.

Indonesia Country Manager Alibaba, Ryan Liu, mengatakan kehadiran Alibaba di Surabaya tidak hanya untuk memperkenalkan platform perdagangan digital, tetapi juga memahami potensi produk lokal dan menyiapkan pelaku usaha agar lebih siap memasuki pasar internasional.



Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto (empat dari kanan) berfoto bersama para pembicara Workshop "Bring East Java Products to 200 Countries Worldwide" di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, Surabaya memiliki ekosistem usaha yang menarik. Selain pertumbuhan ekonominya yang dinamis, kota ini memiliki beragam produk potensial, mulai dari makanan dan minuman, biji kopi, hingga produk kayu dan furnitur.

"Ketika kami datang ke Surabaya, kesan pertama kami adalah Surabaya merupakan kota yang sangat dinamis dan energik, dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Kami juga melihat banyak produk unggulan, seperti makanan dan minuman, biji kopi, produk kayu, hingga furnitur," kata Ryan.

Ia mengatakan sebagian pelaku usaha di Surabaya bahkan telah berhasil menembus pasar Amerika Serikat dan Eropa. Namun, masih banyak pelaku usaha potensial yang belum memiliki akses atau pengetahuan yang cukup untuk menjangkau pembeli internasional.

Karena itu, Alibaba membawa dua agenda utama dalam kunjungannya. Pertama, memberikan pemahaman mengenai pasar global melalui platform Alibaba. Kedua, meluncurkan inisiatif bersama mitra lokal untuk mengembangkan pendidikan ekspor internasional di Surabaya.

"Kami berada di sini untuk melakukan dua hal. Pertama, memahami pasar global melalui Alibaba. Kedua, kami akan meluncurkan inisiatif baru bersama partner untuk mengembangkan pendidikan ekspor internasional di Surabaya dan memperkenalkan produk-produk Surabaya ke pasar global," ujarnya.

Ryan menjelaskan Alibaba saat ini telah berkembang menjadi salah satu platform business-to-business (B2B) dengan jaringan pasar yang luas. Platform tersebut menghubungkan pemasok dengan pembeli dari berbagai negara dan kawasan.

"Alibaba sebenarnya lahir dari bisnis ekspor. Sejak didirikan pada 1999, Alibaba telah berkembang menjadi platform B2B terkemuka. Saat ini kami menjangkau lebih dari 200 negara dan kawasan, dengan sekitar 50 juta pembeli dan lebih dari 200 ribu pemasok di seluruh dunia," jelasnya.

Menurut dia, kerja sama dengan mitra lokal menjadi penting karena pelaku UMKM membutuhkan pendampingan yang lebih dekat dan sesuai dengan kondisi mereka. Dengan dukungan tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya sekadar memasang produk di platform digital, tetapi benar-benar mampu mengelola bisnis untuk pasar ekspor.

Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Surabaya, Medy Prakoso, mengatakan Kadin Surabaya mendukung program yang dilakukan Alibaba karena dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk menembus pasar ekspor.

Ia mengungkapkan, program tersebut sejalan dengan upaya mendorong peningkatan ekspor produk-produk unggulan dari Surabaya. Setelah berdiskusi dengan pihak Alibaba, Kadin melihat terdapat sejumlah fasilitas yang dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan pasar internasional.

"Alibaba ini memiliki beberapa produk yang bagus, di antaranya penjaminan pembayaran, kurasi produk yang akan dipasarkan untuk ekspor, serta akses pasar. Ini semua menjadi trigger untuk mendorong perdagangan Surabaya ke luar negeri," ujar Medy.

Menurutnya, sejumlah produk UMKM Surabaya memiliki potensi untuk dikembangkan ke pasar global. Beberapa di antaranya adalah produk hortikultura, kerajinan (kriya), serta furnitur yang selama ini menjadi salah satu kekuatan industri di Surabaya.

"Beberapa produk UMKM Surabaya yang potensial di antaranya produk horti, kriya, dan furnitur. Semua produk itu bisa dikembangkan untuk ekspor selama perizinan dan legalitasnya sudah tuntas," jelasnya.

Namun, sebelum masuk ke pasar ekspor, Medy menyebutkan pelaku usaha perlu memastikan seluruh aspek legalitas dan perizinan telah terpenuhi. Hal tersebut menjadi salah satu syarat penting agar produk UMKM dapat dipasarkan secara berkelanjutan di pasar internasional.

Kadin Sumut Sebut Bus Rapid Transit Mebidang Dorong Produktivitas Industri dan Pertumbuhan Ekonomi



Launching Angkutan Umum Massal “BRT Membidang” dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution (dua dari kanan) didampingi oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatra Utara Firsal Ferial Mutyara (empat dari kanan), Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kadin Indonesia sekaligus Direktur Utama dari PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono (Kanan), Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Nasional Kadin Indonesia sekaligus Komisaris Utama PT Blue Bird Tbk, Bayu Priawan Djokosoetono (tiga dari kiri), di Terminal Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Rabu (19/08/2026).

Medan – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Firsal Ferial (Dida) Mutyara menyambut peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Membidang berbasis bus listrik oleh Gubernur Provinsi Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di Terminal Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Rabu (19/08/2026).

Ia menilai kehadiran layanan transportasi publik modern yang melayani rute Medan-Binjai (Koridor I) dan Medan-Lubuk Pakam (Koridor II) ini merupakan investasi jangka panjang strategis yang akan memicu produktivitas industri pengolahan, memangkas biaya hidup pekerja, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Sumut.

“Masalah klasik kemacetan lalu lintas di kawasan metropolitan Medan, Binjai dan Deli Serdang selama ini telah membebani efisiensi operasional industri dan menurunkan kualitas hidup tenaga kerja,” katanya.

Lebih lanjut, Kadin Provinsi Sumut menyusun kalkulasi penghematan keuangan yang akan dirasakan langsung oleh ribuan tenaga kerja di Sumut. Selama masa uji coba yang berlangsung hingga Desember 2026, layanan bus listrik ini disediakan secara gratis.

“Ini berarti pengeluaran bulanan transportasi kerja buruh pabrik bernilai nol rupiah,” ujarnya.

Ketika nantinya beroperasi secara penuh, kata Dina, tarif flat murah sebesar Rp4.300 sekali jalan akan menjadi jaminan efisiensi finansial yang besar. Sebagai ilustrasi, jika seorang pekerja pabrik menempuh perjalanan pulang-pergi (PP) selama 25 hari kerja dalam sebulan, estimasi total biaya transportasi yang dikeluarkan hanya sebesar Rp215.000 per bulan (Rp8.600 per hari).

“Kalkulasi ini menunjukkan penghematan pengeluaran yang luar biasa bagi buruh pabrik. Selisih biaya tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga lainnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja,” terangnya.



Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatra Selatan Faisal Ferial Mutyara (kanan) menghadiri peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik di Terminal Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Rabu (19/08/2026)

Lebih jauh, Dida mengatakan bahwa salah satu terobosan paling konkret dari operasional BRT ini adalah terbukanya peluang bagi sektor industri pengolahan untuk menerapkan pola tiga shift kerja secara penuh (24 jam). Layanan BRT Mebidang dikelola dengan skema Buy The Service (BTS), yang membebaskan pengemudi dari tekanan mengejar setoran penumpang. Pengemudi dapat sepenuhnya berfokus pada ketepatan waktu, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan.

“Dengan bus listrik ini juga tingkat keamanan pekerja menjadi lebih terjaga dari ancaman begal. Kadin Sumut optimis, dengan bertambahnya armada bus secara bertahap hingga mencapai 30 bus listrik pada 8 Desember 2026 mendatang, efisiensi waktu tempuh dan mobilitas pekerja akan melonjak tinggi,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, pembangunan transportasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pilihan mobilitas yang layak.

“Semakin banyak kendaraan pribadi, semakin sulit pemerintah memberikan pelayanan. Karena itu pemerintah harus menyiapkan transportasi umum,” ujarnya.

Bobby menegaskan, BRT Mebidang tidak boleh berhenti sebatas peluncuran armada bus, tetapi harus berkembang menjadi sistem transportasi yang saling terkoneksi dan terintegrasi.

“Ini bukan launching bus, tapi transportasi yang terkoneksi dan terintegrasi, sekaligus mendorong perubahan budaya mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum,” pungkasnya.

Kadin Papua Tengah Galang Bantuan untuk Korban Bencana NTT 2026



Kadin Provinsi Papua Tengah menggalang solidaritas kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui gerakan "Kadin Papua Tengah CARE Bencana NTT"

Nabire – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua Tengah menggalang solidaritas kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui gerakan "Kadin Papua Tengah CARE Bencana NTT."

Gerakan tersebut mengajak masyarakat, dunia usaha, pelaku UMKM, koperasi, dan berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama mengumpulkan bantuan bagi warga terdampak bencana di NTT.

Sekretariat Kadin Provinsi Papua Tengah menyampaikan ajakan itu melalui rilis pers bertajuk "Kadin Papua Tengah Ajak Solidaritas Tanpa Batas untuk Korban Bencana NTT 2026" yang diterbitkan di Nabire, Kamis (20/8/2026).

Targetkan Satu Kontainer Bantuan

Kadin Provinsi Papua Tengah menargetkan pengumpulan satu kontainer bantuan untuk dikirimkan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT.

Kadin Provinsi Papua Tengah akan mengoordinasikan pengumpulan bantuan melalui jaringan Kadin di berbagai daerah di Indonesia dengan melibatkan Kadin Provinsi NTT serta Kadin dari sejumlah provinsi lainnya.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan terkumpul secara terarah dan tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak.

Bantuan yang dibutuhkan mencakup bahan makanan dan sembako, selimut, pakaian layak pakai, obat-obatan dan perlengkapan P3K, air bersih, perlengkapan kebersihan, peralatan penunjang, serta dana kemanusiaan.

Kadin Provinsi Papua Tengah Ajak Semua Elemen Bergerak

Kadin Provinsi Papua Tengah menilai bencana tidak mengenal batas wilayah. Karena itu, solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat terdampak juga harus melampaui batas daerah.

"Ketika saudara-saudara kita di NTT membutuhkan bantuan, Papua Tengah harus hadir. Kami mengajak seluruh dunia usaha dan masyarakat untuk bergerak bersama, karena tidak ada bantuan yang terlalu kecil ketika disatukan dalam semangat kemanusiaan," ujar perwakilan Kadin Provinsi Papua Tengah dalam rilis tersebut.

Menurut Kadin Provinsi Papua Tengah, gerakan ini menjadi bentuk nyata kepedulian dunia usaha dan masyarakat Papua Tengah terhadap sesama warga Indonesia yang tengah menghadapi situasi sulit akibat bencana.



Kadin Provinsi Papua Tengah mengajak masyarakat dan dunia usaha membantu masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui gerakan "Kadin Papua Tengah CARE Bencana NTT".

Bantuan Dapat Disalurkan Melalui Posko

Masyarakat yang ingin menyumbangkan bantuan dalam bentuk barang dapat menyerahkannya melalui dua titik pengumpulan yang disiapkan KADIN Papua Tengah.

Posko Utama:

Kantor Kadin Papua Tengah, Jl. Manobi, Kelurahan Kalibobo, Nabire.

Posko Cabang:

Jl. Ampera, dekat Toko DIY Auri, Karang Tumaritis, Nabire.

Sementara itu, masyarakat yang ingin memberikan bantuan berupa dana dapat menyalurkannya melalui rekening berikut:

Bank Papua: 050 020 020 1556 a.n. KADIN Papua Tengah
Bank BRI: 0687 01 023032 53 7 a.n. KADIN Papua Tengah

Untuk informasi dan konfirmasi donasi, masyarakat dapat menghubungi:

WhatsApp: +62 811-8800-1667
WhatsApp: +62 813-4326-6009

Kadin Provinsi Papua Tengah mengajak seluruh pihak berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus memperkuat semangat gotong royong antardaerah.

Gerakan "Kadin Papua Tengah CARE Bencana NTT" menegaskan bahwa kepedulian dan kemanusiaan tidak mengenal jarak maupun batas wilayah.

Semangat tersebut dirangkum dalam seruan: "Satu Hati, Satu Kepedulian, untuk NTT."

Kadin Manggarai Timur Salurkan 107 Paket Sembako untuk Korban Gempa di Kisol

Kadin Kabupaten Manggarai Timur menyalurkan 107 paket sembako kepada warga terdampak gempa melalui Posko Paroki St. Yosef Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 20 Agustus 2026



Manggarai Timur – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyalurkan 107 paket sembako kepada warga terdampak gempa melalui Posko Paroki St. Yosef Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 20 Agustus 2026.

Bantuan itu dihimpun secara gotong royong oleh pengurus Kadin Kabupaten Manggarai Timur bersama Ketua Umum Kadin Provinsi NTT Bobby Lianto. Ketua Kadin Kabupaten Manggarai Timur Maximillian Firman Demorin memimpin langsung penyerahan bantuan tersebut.

Firman mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas Kadin terhadap masyarakat yang terdampak gempa. Menurut dia, kepedulian terhadap korban bencana perlu diwujudkan melalui tindakan nyata sesuai kemampuan masing-masing pihak.

"Dalam kondisi seperti sekarang, yang bisa kita lakukan harus segera kita lakukan. Kadin Kabupaten Manggarai Timur memilih bergerak dengan kemampuan yang ada agar bantuan bisa segera dirasakan masyarakat yang membutuhkan," kata Firman.

Dia mengatakan kebutuhan masyarakat setelah gempa tidak hanya berlangsung selama satu atau dua hari. Karena itu, bantuan kebutuhan pokok perlu dilakukan secara berkelanjutan selama kondisi warga belum sepenuhnya pulih.

"Yang kita harapkan adalah solidaritas ini terus bergerak. Tidak harus menunggu besar untuk mulai membantu. Setiap pihak bisa mengambil bagian sesuai kemampuan dan jangkauannya," ujarnya.

Kisol merupakan salah satu wilayah yang terdampak gempa. Sejumlah rumah dilaporkan rusak dan roboh. Sebagian warga mendirikan tenda secara mandiri dan memilih beristirahat di luar rumah untuk mengantisipasi gempa susulan.

Seorang warga di wilayah tersebut juga meninggal setelah tertimpa reruntuhan pada hari pertama gempa.

Posko Paroki St. Yosef Kisol mulai beroperasi pada Selasa, 18 Agustus 2026. Posko itu menjadi salah satu titik pendataan sekaligus penyaluran bantuan bagi keluarga terdampak di wilayah pelayanan Paroki Kisol.

Firman mengatakan Kadin Kabupaten Manggarai Timur memahami bahwa dampak gempa tersebar di sejumlah wilayah. Beberapa daerah mengalami kerusakan lebih berat dan memiliki akses yang lebih sulit.

Karena itu, dia berharap gerakan bantuan dapat diperluas sesuai kapasitas dan jangkauan masing-masing pihak.

"Berdasarkan informasi yang kami terima melalui Kadin Provinsi NTT, bantuan Kadin di tingkat nasional juga sedang dalam proses. Kita berharap nantinya dukungan dalam skala yang lebih besar dapat menjangkau lebih luas dan masuk lebih dalam ke wilayah-wilayah yang membutuhkan," kata Firman.

Menurut dia, seluruh wilayah terdampak perlu mendapat perhatian.

"Semua yang terdampak adalah saudara kita. Kita bergerak dari apa yang bisa dilakukan sekarang, sambil terus mendorong agar bantuan yang lebih luas dapat menjangkau daerah-daerah dengan kebutuhan yang lebih besar," ujarnya.

Pastor Paroki St. Yosef Kisol RD Agustinus Rame mengapresiasi bantuan tersebut. Dia menyampaikan terima kasih kepada Kadin Kabupaten Manggarai Timur dan Kadin Provinsi NTT atas kepedulian terhadap warga terdampak gempa.

Agustinus juga mengapresiasi pengurus Kadin yang tetap membantu masyarakat meski sebagian di antaranya turut merasakan dampak gempa.

Dia mendoakan agar jajaran Kadin Manggarai Timur dan Kadin Provinsi NTT diberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan dalam menjalankan karya dan pelayanan kepada masyarakat.



Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan bantuan ke sejumlah wilayah yang terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur Sabtu, 15 Agustus 2026.

Kadin NTT Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke 7 Wilayah Terdampak Gempa Flores

Kupang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat merespons dampak gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Respons dilakukan melalui tujuh Dewan Pengurus Kadin Daerah yang berada di Kabupaten Nagekeo, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Jajaran Kadin di daerah langsung melakukan pemantauan kondisi lapangan, mendata kebutuhan masyarakat, serta menyalurkan bantuan awal kepada warga terdampak.

Ketua Umum Kadin Provinsi NTT Bobby Lianto mengatakan koordinasi dengan para ketua Kadin daerah dilakukan segera setelah gempa terjadi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat dapat dipantau sekaligus mempercepat distribusi bantuan ke wilayah yang membutuhkan.

Bantuan awal diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak, antara lain sembako, terpal, uang tunai, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Bantuan terutama diberikan kepada masyarakat yang harus mengungsi dan bertahan di ruang terbuka karena rumah mereka terdampak gempa.

Di Kabupaten Sikka, Ketua Kadin Kabupaten Sikka Hari Japira turun langsung memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak. Bantuan juga diberikan kepada korban yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit serta disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Sikka.

Respons serupa dilakukan Kadin Kabupaten Manggarai. Ketua Kadin Kabupaten Manggarai, Boni, turun langsung ke wilayah Reo dan mendatangi tiga titik pengungsian untuk melihat kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan.

Sementara itu, di Kabupaten Ende, Ketua Kadin Kabupaten Ende Haji Heri Jufri memimpin langsung penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah terdampak. Tim Kadin sempat mengalami kendala akses karena sejumlah ruas jalan tertutup material longsor dan mengalami gangguan akibat gempa.

Dengan dukungan alat berat serta kerja sama tim di lapangan, rombongan Kadin akhirnya dapat melewati sejumlah titik yang sulit dijangkau. Tim kemudian melanjutkan perjalanan untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan.

Pergerakan serupa juga dilakukan jajaran Kadin Kabupaten Nagekeo dan sejumlah kabupaten lainnya. Kadin Provinsi NTT memastikan koordinasi antarwilayah terus dilakukan agar bantuan tidak hanya diberikan kepada daerah yang mudah dijangkau, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat di lokasi yang menghadapi kendala akses.

Bobby mengatakan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah masih cukup besar. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketersediaan makanan dan minuman di Kabupaten Nagekeo.

Menurut laporan Ketua Kadin Kabupaten Nagekeo Sambu Airelius, sejumlah toko dan tempat usaha turut terdampak gempa sehingga aktivitas perdagangan mengalami gangguan. Kondisi tersebut berdampak pada ketersediaan serta distribusi kebutuhan dasar masyarakat.

"Di Nagekeo masih ada kendala dalam hal suplai makanan dan minuman karena toko-toko yang terdampak gempa. Ini menjadi perhatian kami," kata Bobby.

Untuk memperkuat respons kemanusiaan, Bobby telah menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie. Kadin Provinsi NTT juga mengupayakan tambahan bantuan berupa lampu tenaga surya, genset, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan selama masa tanggap darurat.

Bobby menegaskan Kadin Provinsi NTT bersama jajaran Kadin daerah akan terus hadir di tengah masyarakat selama proses penanganan bencana. Menurutnya, Ka tidak hanya memiliki fungsi dalam bidang ekonomi dan dunia usaha, tetapi juga memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam aksi sosial dan kemanusiaan ketika masyarakat menghadapi bencana.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kata Bobby, menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kepedulian, solidaritas, dan gotong royong.

"Kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang kepedulian dan gotong royong. Ketika masyarakat sedang menghadapi musibah, kita harus hadir dan membantu," ujarnya.

Kadin Provinsi NTT memastikan koordinasi dengan jajaran Kadin daerah dan berbagai pihak akan terus diperkuat untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan bantuan diberikan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Kadin dan Asosiasi



Kadin Dorong Penguatan Sinergi dengan di MUNAS IV APPEKNAS untuk Percepat Transformasi Industri Konstruksi Nasional

Foto bersama usai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-IV APPEKNAS Tahun 2026 yang digelar di Hotel ShanKee Sudirman, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong penguatan sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional (APPEKNAS) dalam menghadapi tantangan dan peluang industri konstruksi nasional. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-IV APPEKNAS Tahun 2026 yang digelar di Hotel ShanKee Sudirman, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan apresiasi Kadin Indonesia atas terselenggaranya MUNAS Ke-IV APPEKNAS sebagai forum strategis untuk menentukan arah organisasi sekaligus merumuskan kontribusi dunia usaha terhadap kemajuan industri konstruksi nasional.

MUNAS Ke-IV APPEKNAS mengusung tema “Transformasi Badan Usaha Kontraktor yang Adaptif, Profesional, dan Berintegritas sebagai Pilar Utama Kemajuan Industri Konstruksi Indonesia”.

Menurut Kadin Indonesia, tema tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dan kebutuhan dunia usaha, mengingat sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam sambutan, sektor konstruksi menyumbang 9,83 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2025 dan menjadi sektor ekonomi terbesar keempat.

Sektor ini juga menyerap lebih dari 8,7 juta tenaga kerja atau sekitar 6 persen dari total angkatan kerja Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya kontribusi industri konstruksi terhadap aktivitas ekonomi dan pembangunan nasional.

Pada 2026, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum disebut mencapai Rp118,5 triliun untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas. Pemerintah juga telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi dengan total outlook sekitar Rp16,23 triliun yang diarahkan untuk sektor konstruksi dan properti nasional. Kadin Indonesia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal positif sekaligus peluang yang perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha jasa konstruksi.

Dalam sambutannya, Widiyanto juga memaparkan hasil Strategic Response Meeting (SRM) Kadin Indonesia yang telah dilaksanakan sejak April 2026. Forum tersebut menjadi wadah internal lintas sektor untuk menghimpun masukan dari dunia usaha dan merumuskannya menjadi usulan kebijakan kepada pemerintah. Hingga saat ini, SRM telah berlangsung sekitar 10 sesi yang melibatkan delapan Wakil Ketua Umum Koordinator dan empat Kepala Badan, dengan total 326 usulan kebijakan lintas sektor.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam SRM dan dinilai relevan dengan kondisi anggota APPEKNAS antara lain persoalan likuiditas kontraktor, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta percepatan regulasi di sektor perumahan.

Dalam persoalan likuiditas, SRM mencatat tekanan margin kontraktor hingga defisit 5-12 persen serta kenaikan harga solar industri dan aspal yang sempat mencapai 20-30 persen. Kondisi tersebut mendorong usulan penerapan klausul penyesuaian harga atau price adjustment dalam kontrak, percepatan pencairan termin proyek pemerintah, serta skema restrukturisasi kredit dan penjaminan proyek bagi kontraktor terdampak.

Sementara pada sektor KPBU, porsi infrastruktur yang dibiayai melalui skema tersebut disebut baru sekitar 10 persen. Di sisi lain, target RPJMN 2025-2029 mencapai Rp544,48 triliun dengan funding gap sebesar Rp753 triliun. Untuk itu, Kadin mendorong pembentukan tim kerja KPBU serta peninjauan kembali regulasi agar skema pembiayaan tersebut semakin menarik bagi investor dan kontraktor nasional.

Isu perumahan juga menjadi perhatian, termasuk percepatan RUU Perumahan atau Omnibus Law PKP, penetapan zona khusus rumah subsidi, serta program pemutihan proyek perumahan eksisting yang masih menghadapi persoalan tumpang tindih regulasi perizinan.

Kadin Indonesia menilai berbagai isu tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan agenda MUNAS Ke-IV APPEKNAS, khususnya dalam memperkuat kepastian usaha, meningkatkan daya saing kontraktor, serta mendorong kebijakan konstruksi yang lebih responsif terhadap kondisi di lapangan. Kadin juga berharap APPEKNAS dapat terus memberikan masukan berbasis data sehingga proses advokasi kepada pemerintah semakin kuat.

Selain itu, program pembangunan perumahan nasional turut menjadi peluang bagi pelaku usaha konstruksi. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa hingga pertengahan 2026, Program 3 Juta Rumah telah merealisasikan lebih dari 324 ribu unit rumah secara nasional dengan dukungan anggaran APBN 2026 sebesar Rp58 triliun. Penyaluran Kredit Program Perumahan hingga akhir Juli 2026 juga disebut mencapai Rp22,11 triliun atau 57,81 persen dari target kepada hampir 100 ribu debitur.

Di tengah peluang tersebut, Kadin juga menyoroti tantangan efisiensi investasi nasional. Funding gap KPBU sebesar Rp753 triliun disebut menjadi salah satu gambaran persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Kadin menilai tantangan tersebut harus dijawab melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh ekosistem industri konstruksi, termasuk melalui perbaikan skema pembiayaan.

Sebagai bagian dari komitmennya terhadap ekosistem konstruksi nasional, Kadin Indonesia menegaskan tiga agenda utama, yakni mengawal percepatan pembayaran termin proyek pemerintah dan skema restrukturisasi kredit bagi kontraktor, mendorong penerapan klausul price adjustment serta kejelasan regulasi force majeure, dan mendorong percepatan reformasi skema KPBU serta pembiayaan non-APBN untuk mempercepat penutupan funding gap infrastruktur.

Kadin Indonesia juga memandang APPEKNAS sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekosistem jasa konstruksi nasional. Sinergi kedua organisasi diharapkan dapat terus diperkuat, termasuk melalui penajakan keanggotaan APPEKNAS sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas ruang penyampaian aspirasi para kontraktor nasional dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi.

Munas Ke-IV APPEKNAS diharapkan menghasilkan kepemimpinan dan arah organisasi yang semakin kuat, sekaligus melahirkan Blueprint APPEKNAS 2031 yang mampu menjawab tantangan transformasi teknologi, regulasi, dan persaingan global.

Kadin Indonesia menegaskan kesiapan untuk terus bergandengan tangan bersama APPEKNAS dalam mewujudkan industri konstruksi nasional yang adaptif, profesional, dan berintegritas menuju Indonesia Emas 2045.



PROGRAM PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN (PPNK)

KADIN - LEMHANNAS RI ANGKATAN VII

5-11 Oktober 2026



GEDUNG LEMHANNAS RI, JAKARTA PUSAT

Pendaftaran dibuka untuk **PENGURUS/ANGGOTA KADIN**



INFORMASI & REGISTRASI: SCAN QR
ATAU KUNJUNGI **EVENT.KADIN.ID**





KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



ALFI
ILFA



Strategic Policy Leaders Dialogue



Angga Raka Prabowo

Wakil Menteri Komunikasi
dan Digital RI



Ali Murtopo Simbolon

Deputi Bidang Koordinasi
Perdagangan dan Ekonomi Digital,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian RI

**BUILDING INDONESIA'S SOVEREIGN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUTURE:
From Energy Infrastructure and Industrial
Logistics Nodes to Economic Impact**



**Fithra Faisal
Hastiadi**

Tenaga Ahli Utama/Juru
Bicara Bidang Ekonomi,
Badan Komunikasi Pemerintah



Rakhmad Dewanto

Direktur Perencanaan
Korporat & Pengembangan
Bisnis, PT PLN (Persero)



M. Danny Buldansyah

Director and Chief Business
Officer Indosat Ooredoo
Hutchison



**Neneng
Goenadi**

CEO, Grab Indonesia



**Teguh
Anantawikrama**

WKU Bidang Transformasi
Teknologi, UMKM, dan
Digitalisasi, Kadin Indonesia



**Clarissa Herliani
Tanoesoedibjo**

WKU Bidang Komunikasi
dan Digital, Kadin Indonesia



Akbar Djohan

Ketua Umum DPP ALFI/ILFA,
WKU Bidang Pengembangan
Hilirisasi Komoditas Besi dan
Baja Kadin Indonesia



**Leo Yulianto
Sutedja**

Bendahara Umum, HKI

RABU, 2 SEPTEMBER 2026 - 08.00 - 12.00 WIB
MOCHTAR RIADY, MENARA KADIN INDONESIA LT.29
JL. H.R. RASUNA SAID BLOK X-5 KAV. 2-3,
JAKARTA SELATAN



MODERATOR:

Alex Datuk

Direktur Utama
PT Krakatau
Sarana Properti

Register Now!



DIDUKUNG OLEH

indosat
BUSINESS

mekari

AMANTRA



SAYEMBARA DESAIN LOGO HUT KE-58 KADIN INDONESIA & FOTOGRAFI UMKM

**Pendaftaran & Pengiriman Karya
Ditutup Senin, 31 Agustus 2026 | 23:59 WIB**

- Penetapan Pemenang pada **4 September 2026**
- Pengumuman Pemenang akan **dipublikasikan pada akun media sosial resmi Kadin Indonesia.**
- Logo dan hasil foto yang terpilih akan menjadi **identitas visual resmi** dan digunakan dalam seluruh rangkaian kegiatan perayaan **HUT Kadin Indonesia ke-58.**

INFORMASI SELINGKAPNYA





LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

KADIN DKI JAKARTA x LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
Mengundang Anggota KADIN untuk bertemu, mendapatkan informasi
serta menjajaki **peluang investasi potensial** dalam:

INVESTOR GATHERING 2026

KAMIS **3** SEPT
2026

*Kursi Terbatas



Scan dan
Konfirmasi
Kehadiran
Anda

- Sosialisasi Fungsi, Tugas, Wewenang LPS
- Networking Calon Investor
- ▶ Kepemilikan Bank
- ▶ Portofolio Kredit
- ▶ Aset Properti
- ▶ Aset Potensial Lainnya

Explore the Opportunity. Build the Partnership. Create the Value.



APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

Bisa ke Luar Negeri Tanpa Visa!

ABTC adalah kartu perjalanan pebisnis yang berlaku di negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC sebanyak 19 negara anggota, kecuali Amerika Serikat dan Kanada.



APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC) berlaku di 19 negara:



Australia



Jepang



Rusia



Brunei
Darussalam



Korea Selatan



Selandia Baru



Cile



Malaysia



Singapura



China



Meksiko



Tailan



Filipina



Papua Nugini



Taiwan



Hong Kong



Peru



Vietnam



Indonesia



Keuntungan Memiliki ABTC:



Bebas visa untuk negara-negara APEC, kecuali Amerika Serikat dan Kanada



Bisa menetap 90 hari per kunjungan



Jalur ekspres VIP di imigrasi bandara



Persyaratan Permohonan Surat Rekomendasi APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

- 1 Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Eksekutif Kadin Indonesia, dilengkapi dengan kop surat perusahaan, data pemohon, tanda tangan pimpinan & stempel Perusahaan
- 2 Scan paspor pemohon masa berlaku min. 2 tahun
- 3 Scan KTA Kadin aktif 2026 (nama dalam KTAB harus sama dengan yang mengajukan)
- 4 Scan NIB perusahaan
- 5 Scan ABTC terakhir (untuk perpanjangan ABTC)/optional



layanan.abtc@gmail.com



<https://trade.layanankadin.id/abtc>

Layanan Dokumen Ekspor

Kadin Indonesia membuka layanan dokumen ekspor, seperti Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO), Certificate of Export Goods, Certificate of Free Sale, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

COO merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.

Jenis SKA/COO

SKA Preferensi

Jenis SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan.

SKA Non Preferensi

Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu.

Tahapan Membuat Dokumen Ekspor:



- 1 Buka laman <https://trade.kadin.id>
- 2 Log in atau Mendaftar Akun
- 3 Melengkapi Data-data perusahaan
- 4 Melakukan Pembayaran
- 5 Dokumen siap dicetak dan digunakan

Jenis Formulir COO

Form China	Form untuk barang yang termasuk dalam Perjanjian Perdagangan Bebas CHINA-ASEAN yang menggunakan Common Effective Preferential Tariff Scheme yang diekspor ke CHINA - dibutuhkan CoO Kemendag.
Form B	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di Indonesia.
Form B with Notification	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dengan pemberitahuan.
Form ASEAN-India	Form yang membutuhkan sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan barang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-INDIA - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form A	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang diproduksi di Indonesia, dan memenuhi persyaratan Generalized System of Preferences.
Form D	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form Textile Product	Form untuk produk tekstil dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan barang diproduksi di Indonesia
Form Certificate of Export Goods	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di banyak negara.
Form Certificate of Free Sale	Form untuk bahan makanan yang diproduksi di Indonesia dan tersedia secara bebas untuk dijual di Indonesia dan pasar luar negeri.



GUNAKAN ATA CARNET UNTUK KEPERLUAN EKSPOR SEMENTARA

APA ITU ATA CARNET?

ATA Carnet adalah sistem dan dokumen untuk kegiatan impor/ekspor sementara yang dapat dipergunakan dalam cakupan wilayah 81 negara.

Carnet merupakan dokumen pabean internasional yang diterima sebagai pemberitahuan pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.

Secara sederhana, ATA Carnet diistilahkan sebagai **"Paspor untuk Barang"**. Penerapan ATA Carnet dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat prosedur impor dan ekspor sementara sebagai upaya memfasilitasi dunia bisnis internasional.

PENGGUNA ATA CARNET

Pebisnis

Teknisi

**Penyelenggara
Pameran**

**Profesional,
perorangan/tim**

Kru Film

**Dokter/
Ahli Bedah**

Arsitek

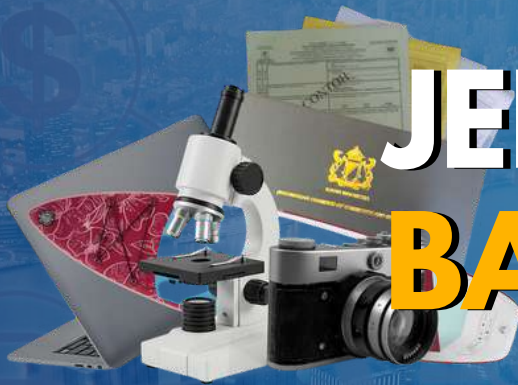
Seniman

Engineer

Peneliti

Tim Olahraga

Grup Musik



JENIS-JENIS BARANG

Penerapan **ATA Carnet** dilakukan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Izin Masuk/Penerimaan Sementara (Convention On Temporary Admission), Istanbul 1990. Barang-barang yang diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan menggunakan ATA Carnet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228 tahun 2014 mengenai Impor Sementara, yaitu barang-barang untuk tujuan sebagai berikut:

1

Untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis

2

Untuk peralatan profesional atau tenaga ahli

3

Untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan

4

Untuk keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga

5

Untuk tujuan kemanusiaan

Sementara itu, penggunaan ATA Carnet di negara tujuan selain Indonesia disesuaikan dengan aturan masing-masing negara tersebut mengenai penetapan tujuan barang yang menggunakan ATA Carnet.

PERSYARATAN PENERBITAN ATA CARNET

Salinan (*copy*) identitas diri Pemegang Carnet atau yang mewakili

Surat Kuasa Pemegang Carnet kepada yang mewakili

Salinan (*copy*) Kartu Tanda Keanggotaan Kadin

Salinan (*copy*) NPWP Perusahaan/Perorangan

Salinan (*copy*) SIUP, TDP, dan Domisili Perusahaan

Dokumen Deskripsi Barang, Foto Berwarna, Keterangan dimensi barang, negara pembuat barang dan harga barang

Rencana Perjalanan Barang

Surat Undangan penyelenggaraan dari negara asal

Menandatangani surat pernyataan bermaterai

Meletakkan Jaminan

NEGARA-NEGARA YANG MENERBITKAN DAN MENERIMA **ATA CARNET UNTUK KEPERLUAN EKSPOR DAN IMPOR SEMENTARA:**

- | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Afrika Selatan | 28. Inggris | 55. Pakistan |
| 2. Amerika Serikat | 29. Iran | 56. Pantai Gading |
| 3. Albania | 30. Irlandia | 57. Prancis |
| 4. Algeria | 31. Islandia | 58. Peru |
| 5. Andora | 32. Israel | 59. Polandia |
| 6. Arab Saudi | 33. Italia | 60. Portugal |
| 7. Australia | 34. Jepang | 61. Qatar |
| 8. Austria | 35. Jerman | 62. Republik Ceko |
| 9. Bahrain | 36. Kanada | 63. Rumania |
| 10. Belanda | 37. Kazakstan | 64. Rusia |
| 11. Belarus | 38. Korea Selatan | 65. Selandia Baru |
| 12. Belgia | 39. Latvia | 66. Senegal |
| 13. Bosnia Herzegovina | 40. Libanon | 67. Serbia |
| 14. Bulgaria | 41. Lithuania | 68. Singapura |
| 15. Chili | 42. Luksemburg | 69. Slowakia |
| 16. China | 43. Makau | 70. Slowenia |
| 17. Kroasia | 44. Madagaskar | 71. Spanyol |
| 18. Siprus | 45. Malaysia | 72. Sri Lanka |
| 19. Denmark | 46. Malta | 73. Swedia |
| 20. Estonia | 47. Maroko | 74. Swis |
| 21. Finlandia | 48. Mauritius | 75. Tailan |
| 22. Filipina | 49. Makedonia Utara | 76. Tunisia |
| 23. Gibraltar | 50. Meksiko | 77. Turki |
| 24. Hong Kong | 51. Moldova | 78. Ukraina |
| 25. Hungaria | 52. Mongolia | 79. Uni Emirat Arab |
| 26. India | 53. Montenegro | 80. Vietnam |
| 27. Indonesia | 54. Norwegia | 81. Yunani |

Dokumen **Ata Carnet** dikeluarkan oleh: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

Kontak:

Menara Kadin Indonesia Lantai 24, 29
Jl. HR Rasuna Said X-5 Kav.2-3
Kuningan, Jakarta



Telp. (021) 5274484



atacarnet.idn@kadin.id

atau

atacarnetindonesia@gmail.com

Cantumkan subject email:

- **Pengajuan ATA Carnet** (jika akan mengajukan ATA Carnet)
- **Info ATA Carnet** (jika ingin mendapatkan informasi mengenai ATA Carnet)





Cara Mendaftar Menjadi Anggota Kadin

Akses Situs Resmi

<https://kadin.id/keanggotaan>



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id

Tata Cara Daftar Menjadi Anggota Kadin

1

Daftar Akun

Buka *laman* <https://anggota.kadin.id>

5

Pembayaran

Lakukan pembayaran melalui sistem anggota Kadin

2

Verifikasi Akun

Klik link verifikasi yang dikirimkan ke email anda

6

Validasi Pembayaran

Bagian Keuangan Sekretariat Kadin Indonesia akan memvalidasi pembayaran anda

3

Isi Data Perusahaan/Asosiasi

Lengkapi informasi perusahaan atau asosiasi anda

7

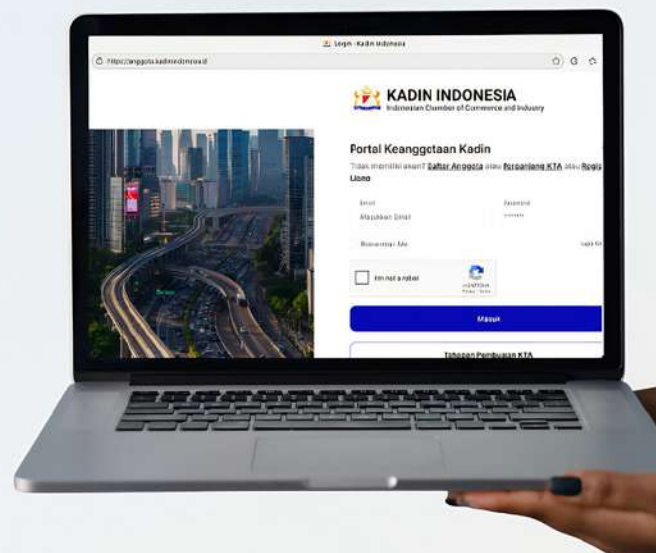
Menjadi Anggota Resmi

Setelah divalidasi, anda resmi menjadi anggota! KTA dan invoice dikirimkan ke email anda

4

Verifikasi oleh Admin

Admin Kadin akan memverifikasi data anda



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id

KTA & SBU

Mengapa harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kompetensi, maupun SBU Non-Konstruksi dari Kadin Indonesia?



- KTA dan SBU Kadin dapat **meningkatkan kepercayaan** terhadap perusahaan anda
- Memiliki KTA menunjukkan bahwa **bisnis anda diakui dan terhubung dengan jaringan bisnis yang kuat**
- Kepemilikan KTA Kadin dan SBU dari Kadin **memenuhi kelengkapan prasyarat mengikuti tender pengadaan barang dan jasa**
- KTA dan SBU dari Kadin adalah **dokumen penting bagi perusahaan pemasok barang dan jasa untuk pemerintah atau swasta**
- KTA dan SBU dari Kadin **menunjukkan standar kualitas, integritas dan kompetensi** yang diperlukan perusahaan untuk melayani pemerintah atau klien swasta



Manfaat Keanggotaan Kadin

Tumbuhkan bisnis melalui network dan kolaborasi

Akses terhadap pasar

Dukungan advokasi

Akses terhadap transformasi digital

Scaling up skill/kemampuan wirausaha dan pekerja

Dukungan dalam penerapan TKDN

Kemudahan pembuatan surat keterangan untuk bisnis

Pendampingan menuju Net Zero

Kesempatan promosi

Update terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis

Terlibat dalam penyusunan kebijakan industrial

Potongan harga produk/jasa



Saatnya **Level Up** dan **Maksimalkan Potensi Bisnismu**



Daftar segera menjadi anggota Kadin



anggota@kadinindonesia.id



(+62) 85695410875



kadin.id/keanggotaan

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24 dan 29
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id



Direktur Eksekutif Kadin Indonesia: Pipin Moh. Saeful Arifin

Penerbit: Kadin Communication Office | **Penanggung Jawab:** Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia, Primus Dorimulu | **Redaktur Pelaksana:** Taufik Zulkarnaen

Redaksi: Arita Gloria, Ari Kristiana K, Bagus Dharmawan, Nurdin, Sabrina Hutajulu, Hariwicahyo Utomo, Luthfiah Ramadhani Sugiono, Fery Hasibuan

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. 021- 527503 | humas@kadin.id



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinIndonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id